

Dr. H. ADEN ROSADI, M.Ag.

PERKEMBANGAN PERADILAN ISLAM DI INDONESIA

Kata Pengantar:

Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag.

(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung)



Dr. H. ADEN ROSADI, M.Ag.

PERKEMBANGAN PERADILAN ISLAM DI INDONESIA



SRM.AG.030-01-2018

Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia

Penulis: Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag

Editor: Iqbal Triadi Nugraha

Desain Sampul: Nur Slamet

Layout: Iqbal Triadi Nugraha

Diterbitkan oleh

SIMBIOSA REKATAMA MEDIA

Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252

Telp. (022) 5208370

Faks. (022) 5208370

E-mail: siramedia@yahoo.com

website: www.simbiosarekatama.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, September 2018

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis
Dicetak Oleh PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung

ISBN: 978-602-7973-70-1



Daftar Isi

Daftar Isi — v

Kata Pengantar — ix

Prakata — xi

1. Peradilan dalam Islam — 1

Hakim dalam Peradilan Islam — 11

Teori Keadilan dalam Islam — 15

Latihan — 22

2. Metode Pengkajian Peradilan Islam — 23

Pendahuluan — 23

Kegunaan untuk Pengembangan Kebijakanaksanaan dan Profesi — 35

Latihan — 36

3. Peradilan pada Masa Kesultanan Islam — 37

Peradilan Islam pada Masa Kerajaan Samudera Pasai — 37

Kerajaan Islam pada Masa Kerajaan Mataram — 40

Latihan — 42

4. Peradilan Agama pada Masa Penjajahan Belanda — 43

Sejarah Penetapan *Staatsblad* 1937 No. 116 — 44

Dasar Ditetapkannya *Staatsblad* 1937 No. 116 — 45

Faktor Utama Terbentuknya *Staatsblad* (1882-1937) — 47

Pendapat Para Ahli Hukum — 47

Teori Hukum — 49

Latihan — 49



- 5. Peradilan pada Masa Penjajahan Jepang — 51**
 - Kebijakan Jepang terhadap Peradilan Agama — 54
 - Badan-Badan Peradilan pada Masa Penjajahan Jepang — 56
 - Latihan — 57
- 6. Peradilan Islam pada Masa Kemerdekaan — 59**
 - Periode Awal Kemerdekaan — 60
 - Latihan — 63
- 7. Peradilan pada Masa Orde Lama — 65**
 - Undang-Undang yang Lahir dan Berkaitan dengan Peradilan Agama pada Masa Orde Lama — 67
 - Peraturan Pemerintah yang Berkaitan dengan Peradilan Islam pada Masa Orde Lama — 71
 - Kekuasaan Kehakiman pada Masa Orde Lama — 76
 - Latihan — 80
- 8. Peradilan pada Masa Orde Baru — 81**
 - Kedudukan Peradilan Agama pada Masa Orde Baru — 87
 - Kedudukan Hakim pada Masa Orde Baru — 88
 - Hukum Acara — 89
 - Penyelenggaraan Administrasi — 90
 - UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman — 90
 - UU No. 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Peradilan Agama — 91
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam — 91
 - Latihan — 94
- 9. Peradilan Islam pada Masa Reformasi — 95**
 - Peradilan Agama dalam Sistem Satu Atap — 96
 - Peradilan Agama Sejak Amandemen — 100
 - Pedoman Kode Etik Perilaku Hakim — 103
 - Latihan — 106



10. Mediasi di Pengadilan Agama — 107

Pengertian Mediasi — 107

Sejarah dan Dasar Hukum Mediasi — 107

Proses Mediasi di Pengadilan Agama (Perma No. I Tahun 2008) — 109

Kesepakatan di Luar Pengadilan — 111

Latihan — 112

Lampiran 1: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan — 113

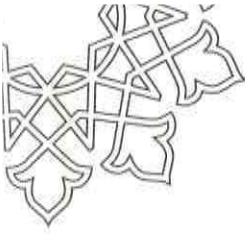
Lampiran 2: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman — 137

Daftar Pustaka — 167

Indeks — 175

Tentang Penulis — 179





Kata Pengantar

Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD)

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala karunia-Nya sehingga buku *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia* karya Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. ini telah selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Salawat dan salam patut diucapkan untuk Nabi Muhammad Saw. sebagai tokoh penegakan hukum dan keadilan serta menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, kehadiran hukum Islam di bumi Nusantara, dengan berbagai macam pendekatan dan kebijakan politik hukumnya, senantiasa menjadi warna tersendiri, terutama dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Begitupun kehadiran dan perkembangan peradilan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Ia menjadi bagian dalam rentetan sejarah hukum Islam yang telah mengakar di kalangan umat Islam Indonesia.

Buku ini mencoba menambahkan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan para mahasiswa dan praktisi hukum dalam memahami perkembangan serta dinamika peradilan Islam sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Sistematika dan cakupan buku ini didasarkan pada hasil kajian akademik yang dilakukan oleh penulis dan disesuaikan dengan silabus yang beroreintasi pada kurikulum KKNI.

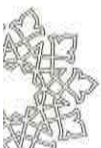
Harapan saya, mudahan-mudahan kehadiran buku ini menjadi salah satu sumbangsih pemikiran yang positif dan konstruktif dalam



mengemban misi keilmuan dan tanggung jawab intelektual, terutama yang berhubungan dengan ilmu syariat dan ilmu hukum. Saya haturkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis disertai doa semoga buku ini menjadi salah satu amal jariah yang abadi pada masa yang akan datang. *Amin.*

Bandung, Agustus 2018

Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag





Prakata

Keberadaan dan perkembangan Peradilan Agama (Islam) di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik (hukum) yang berkembang, baik pada masa kesultanan Islam, kolonialisme, transisi kemerdekaan, maupun pada era reformasi. Perkembangan dan perubahannya paling tidak menyangkut tiga aspek, antara lain: aspek substansi yang berhubungan dengan materi hukum Islam, aspek struktur yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum, dan aspek kultur yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat. Keberadaannya bukan saja sebagai bukti historis dari perkembangan hukum Islam di Indonesia, tetapi juga merupakan sumbangsih pemikiran dan pelaksanaan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Pada proses perkembangannya, peradilan Islam dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi dan internalisasi dari norma (hukum) yang terjadi sebelumnya. Sejarah mencatat, ia juga berhadapan dengan hukum kolonial yang dibawa para penjajah dan secara otoriter cenderung mendukung norma adat daripada hukum Islam. Politik hukum pun mulai dilakukan pemerintah Belanda dengan dikukuhkannya *Priestraad* berdasarkan Keputusan Raja Belanda (KB) Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882.

Awalnya Pengadilan Agama dibentuk di Jawa dan Madura, sedangkan di Kalimantan baru dibentuk pada 1937. Adapun kompetensinya meliputi perkara-perkara antarorang Islam diselesaikan menurut hukum Islam. Di Kalimantan terbatas pada masalah *munakahah*, sedangkan di Jawa dan Madura pada masalah *munakahah* dan *warastash*. Hal tersebut terus berlangsung seiring dengan perubahan politik dan kekuasaan berikutnya hingga masa kemerdekaan dan era Reformasi.

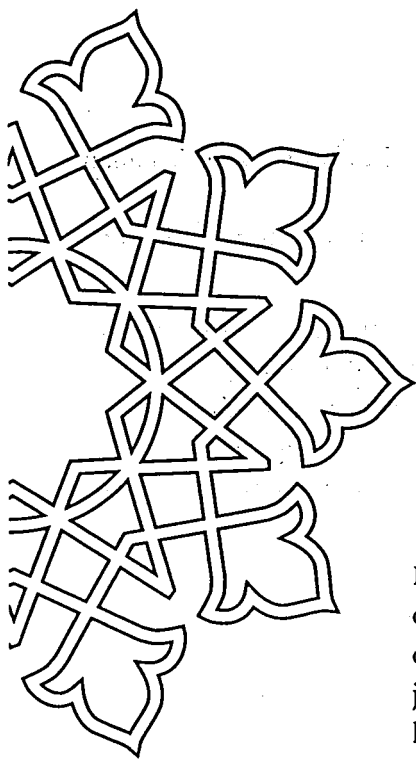


Kehadiran buku ini berupaya menyajikan beberapa hal tentang perkembangan peradilan Islam di Indonesia, termasuk tentang kekuasaan kehakiman dan upaya mediasi. Mudah-mudahan kehadiran buku dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran hukum Islam di Indonesia khususnya, dan di dunia ilmu pada umumnya. Saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan edisi yang akan datang.

Bandung, Agustus 2018

Aden Rosadi





1

Peradilan dalam Islam

Kajian tentang peradilan dalam ranah hukum di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan orang-orang Islam dan hukum Islam. Ia menjadi bagian yang integral dalam bingkai negara hukum Indonesia, baik secara substansial, struktural, maupun kultural.

Secara etimologi, peradilan berarti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan; atau lembaga hukum (yang) bertugas memperbaiki. Sedangkan pengadilan, yang berakar kata dari adil, mempunyai beberapa pengertian, yaitu; 1) dewan atau majelis yang mengadili perkara: mahkamah; 2) proses mengadili; 3) keputusan hakim; 4) sidang hakim ketika mengadili perkara; 5) rumah (bangunan) tempat mengadili perkara (*KBBI Edisi 4, 2011: 10*).

Menurut pengertian tersebut, paling tidak peradilan dapat dipahami sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum serta keadilan. Sedangkan



pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Istilah peradilan dalam Islam disebut dengan *qadla'* yang memiliki arti beragam, di antaranya:

1. *Al-Qadla'* bermakna *al-faraagh*, artinya putus atau selesai, seperti firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ahzab ayat 37 dan QS. Al-Inshirah ayat 7.
2. *Al-Qadla'* bermakna *al-adaa'*, artinya menunaikan atau membayar.
3. *Al-Qadla'* bermakna *al-hukmu*, artinya mencegah, menghalang-halangi. Dari arti inilah *qadli-qadli* disebut hakim karena mencegah terjadi kezaliman orang-orang yang mau berbuat zalim. Adapun *qadli* artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.¹

Adapun pengertian *qadla'* atau peradilan adalah “memutuskan hukum antarmanusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah”. Memutuskan dengan benar dan berdasarkan hukum Allah didasarkan pada firman Allah Swt. dan hadis nabi, antara lain sebagai berikut:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shad [38]: 26).

“Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya” (QS. Yunus [10]: 47).

“Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya” (QS. Yunus [10]: 109).

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah” (QS. Yusuf [12]: 40).

1 Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadla fi al-Islam*, terj. Imran, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 19.

2 Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia



Selain itu, aktivitas memutuskan perkara antarmanusia sudah terjadi seusia dengan umur manusia itu sendiri. Al-Quran mencatat bagaimana para nabi dan rasul sebagai pembawa risalah menjadi pemutus perkara di antara mereka. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Shad ayat 26, Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Daud untuk bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Nabi Saw. juga dalam hadisnya menceritakan bagaimana Nabi Daud dan Sulaiman memutuskan perkara:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Perumpamaanku di hadapan manusia bagaikan seseorang yang menyalakan api lalu kupu-kupu dan hewan-hewan ini masuk ke api tersebut". Dan Beliau juga bersabda: "Ada dua orang wanita dengan bayinya masing-masing lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang dari wanita itu berkata; 'Yang dibawa kabur serigala itu adalah anakmu'. Dan wanita lainnya berkata; 'Justru anakmu yang dibawa kabur serigala itu'. Akhirnya keduanya meminta keputusan kepada Nabi Daud 'Alaihissalam lalu Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik wanita yang lebih tua. Namun, keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman bin Daud 'alahimassalam dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi kepadanya. Maka Sulaiman berkata: 'Berikan pisau agar aku potong bayi ini menjadi dua'. Wanita yang lebih muda berkata; 'Jangan kamu lakukan. Semoga Allah merahmatimu, anak itu miliknya'. Maka akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda". Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Demi Allah, aku belum pernah mendengar tentang 'sikkin' (pisau) dalam kisah ini kecuali hari ini dan kami tidak pernah mengatakannya kecuali al-mudyah (golok)" (HR. Bukhari).*

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy ra. bahwa keduanya berkata; Ada seorang warga Arab datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: *"Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah kepadamu bahwa engkau tidak memutuskan perkara di antara kami melainkan dengan Kitab Allah". Lalu lawan yang tutur katanya*



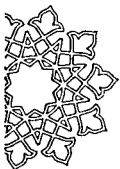
lebih baik dari padanya berkata: 'Dia benar, putuskan perkara di antara kami dengan Kitab Allah dan perkenankanlah untukku'. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Katakan'. Seorang warga Arab berkata: 'Sesungguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya maka aku diberi tahu bahwa anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahwa atas anakku cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan untuk istri orang ini dirajam'. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun seorang budak dan kambing seharusnya dikembalikan dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku maka rajamlah'. Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam" (HR. Bukhari).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan berlangsung relatif sederhana. Hakim pada saat itu tidak memiliki juru tulis (panitera) dan putusan pengadilan tidak dapat dibukukan (kodifikasi). Setiap putusan yang dikeluarkan, secara langsung dilaksanakan oleh hakim. Aturan-aturan terperinci, cara menyampaikan pengaduan, pembagian kerja yang dilaksanakan kemudian hari, belum dibutuhkan pada masa itu. Wewenang (kompetensi) peradilan para hakim pada masa Khulafaur Rasyidin umumnya terbatas pada perkara perdata. Sedangkan yang berhubungan dengan perkara pidana (*hudud* dan *ta'zir*) dilaksanakan oleh khalifah atau sultan (wali).²

Pada masa Bani Umayyah, putusan pengadilan mulai dicatat agar mudah menjadi rujukan bila terjadi kekeliruan. Syarat-syarat menjadi hakim dan tempat pengadilan ditentukan serta peradilan ketidakadilan (*qadla al-mazhalim*) mulai diperkenalkan. Pada masa Abbasiyah, bentuk dan proses

2 Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Teori dan Sistem Pembentukan*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 67-69.

4 Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia



peradilan, atau hukum acara peradilan (hukum formal), mulai dikembangkan; begitu juga jenis-jenis peradilan. Pada masa ini juga dikenal sebutan Hakim Agung (*Qadli al-Qudla*) atau Hakim Kelompok (*Qadli al-Jama'ah*) yang relatif mirip dengan kekuasaan kehakiman pada masa sekarang. Ciri lain pada masa ini adalah bahwa para hakim tidak banyak melakukan *ijtihad*³ dan cenderung mengikuti mazhab *fiqh* yang sudah ada. Dalam konteks ini, pengadilan di Irak memutus perkara berdasarkan mazhab Abu Hanifah; Suria dan Maghribi berdasarkan mazhab Maliki; serta Mesir berdasarkan mazhab Syafi'i.⁴

Pada masa berikutnya, bentuk peradilan semakin berkembang dan bervariasi. Ibnu Hasan al-Nabahi menggambarkan bentuk peradilan di Andalusia pada abad kedelapan Hijriah. Ia menyatakan bahwa para hakim (*al-hukkam*) yang memutus perkara terdiri atas *al-qudlat* (para *qadli*, hakim), *al-syurthah al-wustha* (polisi mayor), *al-syurthah al-sughra* (polisi minor), *shahib al-mazhalim* (pejabat masalah ketidakadilan), *shahib al-radd* (pejabat bantahan, banding), *shahib al-madinah* (pejabat kota), dan *shahib al-suq* (pejabat pasar, masalah perdagangan).

Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan tentang peradilan di negara Maghrib pada abad kedelapan Hijriah. Menurutnya, penetapan dan putusan hakim juga berasal dari lembaga *al-Hisbah* (perhitungan kekayaan, terutama pejabat negara) yang menjadi wewenang *wali al-hisbah*. Salah satu tradisi yang diikuti adalah bahwa para personel yang bekerja pada jenis jabatan ini termasuk dalam wewenang khusus. Peradilan *al-Mazhalim* juga termasuk wilayah khusus, menjadi wewenang apa yang disebut *Wali al-Mazhalim* (pejabat masalah ketidakadilan). Masalah uang dan mata uang juga termasuk wewenang peradilan khusus dan yang menjadi pejabat disebut *wazir* (menteri) dan *nazir al-balad* (inspektur negeri) yang bertugas memeriksa masalah keuangan dan dikenal dengan istilah wilayah *istifa'* (pemenuhan sukatan, timbangan, dan sebagainya). Orang yang bertanggung jawab untuk

3 *Ijtihad* menurut Abu Hamid al-Ghazali adalah usaha keras yang dilakukan oleh *mujtahid* dalam mencari ketentuan-ketentuan hukum syariat. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Musthafa fi 'Ilm al-Ushul* Jilid I, Beirut: Dar al-Ihya atoTurats al-'Arabi, reprint cet. Mesir 1324 H, hlm. 350.

4 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, cet.V, t.t, hlm. 1150.



mengelolanya disebut *wilayah al-syarr* (pejabat sengketa, pembuktian hak-hak, penyelesaian masalah perkawinan, perceraian, nafkah, sah dan tidaknya menjadi wewenang khusus *al-hakim* serta *al-qadli*).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa syariat Islam tidak menentukan kerangka organisatoris peradilan. Ia hanya meletakkan kaidah-kaidah umum, prinsip-prinsip dasar, dan tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat, atau waktu pengikutsertaan hakim yang lain, di samping hakim utama dan lain-lain, diserahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat, dengan catatan bahwa semua itu harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sah. Syariat Islam juga tidak menetapkan secara baku tentang tingkatan peradilan, seperti tingkat pertama, banding, atau kasasi. Ia hanya dapat ditetapkan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan⁵ sesuai kebutuhan serta rasa keadilan. Di samping itu, masalah hakim untuk perkara pidana tidak berada dalam satu lembaga, tetapi terbagi di bawah kompetensi beberapa jabatan, seperti khalifah, *wali al-mazhalim*, *al-amir*, *wali al-harb*, *shahib al-syurthah*, *al-muhtasib*, *al-qadli*, atau *al-hakim* dalam pengertian sempit, seperti dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Secara historis, peradilan Islam mempunyai beberapa yurisdiksi, antara lain:⁶

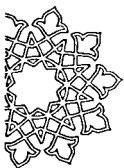
1. *Al-Ikhtishash al-Naw* (kompetensi yang berhubungan dengan jenis perkara).⁷ Hakim memutus perkara sesuai dengan kompetensi tertentu, misalnya perdata khusus menyangkut hukum keluarga, perdata khusus menyangkut hukum ekonomi dan sebagainya.

5 Istilah Peraturan Perundang-Undangan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalamnya juga diatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6 Mahmud Saedon Awang, *et.al.*, *Undang-Undang Keterangan Islam*, hlm. 56-59.

7 Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *absolute competentie*, artinya kompetensi sebuah badan peradilan yang berhubungan dengan subjek hukum dan jenis perkara. Sebagai contoh kompetensi badan Peradilan Agama sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yakni menyelesaikan perkara di kalangan orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, wakaf, wasiat, hibah, perkawinan, sedekah, infak, zakat, dan ekonomi syariat.

6 Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia



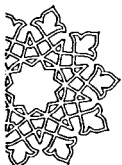
2. *Al-Ikhtishash al-Miqdar al-Mu'ayyan* (kompetensi dengan ukuran tertentu). Sebagai contoh, hakim untuk perkara minimal di bawah 200 dirham dan 20 dinar.
3. *Al-Ikhtishash bi al-Qadliyyah al-Mu'ayyanah* (kompetensi dengan suatu perkara tertentu saja).
4. *Al-Istitsna ba'da al-Waqai' wa al-Hawadits* (hakim yang mengadili semua jenis perkara selain yang dikecualikan).
5. *Al-Ikhtishash al-Makani* (hakim dengan kompetensi di tempat tertentu saja, misalnya di suatu kota atau daerah tertentu).
6. *Al-Ikhtishash al-Qadli bi al-Zaman al-Mu'ayyan* (hakim dengan kompetensi mengadili dalam hari tertentu atau bulan tertentu).
7. *Al-Ikhtishash al-Qudlat 'inda Ta'addudihim* (beberapa hakim diangkat di suatu tempat).
8. *Al-Ikhtishash al-Qadli bi al-Mazhab al-Mu'ayyan* (hakim yang mengadili perkara berdasarkan mazhab tertentu).

Para ahli mengungkapkan bahwa pada masa sahabat terjadi surat menyurat antara khalifah dan gubernur (hakim), antara lain surat Khalifah Umar ibn Khattab r.a. kepada Abu Musa Al-Asy'ari r.a.—*qadli* di Provinsi Kufah—yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di pengadilan, yang kemudian menjadi pedoman bagi para hakim atau *qadli* pada masa mendatang. Isi dari pokok pernyataan Khalifah Umar Ibn Khattab r.a. tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Amma ba'du*, sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikukuhkan dan sunah yang harus diikuti.
2. Lalu pamilah apabila diajukan kepada suatu perkara dan putus-kanlah apabila telah jelas kedudukannya karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaan.
3. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelis-mu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.



4. Bukti itu wajib atas penggugat (penuduh), sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (tergugat).
5. Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
6. Barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, ia berhak dikalahkan karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
7. Janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu, suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apa pun, sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.
8. Orang-orang Islam itu (dianggap) adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman *had*, atau orang yang diragukan tentang asal-usulnya. Karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.
9. Kemudian pamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam Al-Quran dan tidak terdapat pula dalam sunah Nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu dan perhatikanlah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu). Kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridai Allah dan lebih mendekati kebenaran.
10. Hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka. Karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah



termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Barangsiapa memurnikan niatnya demi mencari kebenaran, walaupun merugikan diri sendiri, Allah akan memberikannya kecukupan, dan barangsiapa berlagak (memiliki keahlian) kejelekannya itu karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima (amal) dari hamba-Nya, kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.⁸

Meskipun surat yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar r.a. kepada Abu Musa al-Asy'ari seperti surat biasa, jika dalam hukum ketatanegaraan, surat yang dikeluarkan oleh Umar tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai undang-undang seperti sekarang karena posisi Umar r.a. adalah sebagai khalifah, yaitu seorang kepala pemerintahan tertinggi dalam Islam pada saat itu yang memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun militer. Hal ini harus dipahami bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan negara belum terbagi dalam sistem *trias politica* seperti sekarang. Oleh karena itu, surat Khalifah Umar r.a. dapat dipandang sebagai undang-undang negara tentang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan.

Jika dilihat dari materinya, banyak yang menarik untuk dikaji secara mendalam tentang konsepsi kekuasaan kehakiman atau peradilan tersebut, salah satunya pada poin kedelapan. Umar r.a. menetapkan sebuah prinsip dasar dan utama dalam melihat umat Islam, yaitu bahwa orang-orang muslim, di mana pun dan siapa pun (tidak melihat ras, suku, bangsa, atau golongan selama mereka itu Islam), harus dipandang bahwa mereka itu adil atau memiliki sifat dan sikap adil satu sama lainnya. Prinsip *al-muslimun 'udul* juga harus dilihat dari sistem politik kewarganegaraan yang dianut oleh khilafah Islamiah. Dalam sistem politik khilafah Islam, warga negara diklasifikasikan atas dua kelompok utama, yaitu muslim dan *ahl dzimni* (nonmuslim yang tunduk terhadap pemerintahan Islam

8 Ibid., hlm. 43-46.



dengan memberikan sejumlah kompensasi ekonomi [*jizyah*] dan sebagai imbalannya, mereka dilindungi jiwa, harta, serta agamanya). Derajat *ahl dzimni* juga pada dasarnya setara dengan umat Islam, seperti sabda Nabi Saw., “*Barangsiapa yang memusuhi ahl dzimni, maka saya adalah musuhnya di akhirat*”. Aspek lainnya bahwa prinsip *al-muslimun ‘udul* bisa saja terbatas dalam kaitannya di muka pengadilan atau dalam persaksian suatu perkara.⁹

Terdapat beberapa hadis yang menguatkan pendapat Khalifah Umar bin Khatab, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sa’id bin Musayyab sebagai berikut:

Dari Sa’id bin Musayyab berkata, “*Ada seorang muslim yang sedang berselisih dengan seorang Yahudi menghadap kepada Umar bin Khattab, lalu Umar melihat bahwa kebenaran ada pada pihak Yahudi sehingga ia memenangkan orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut berkata kepadanya; ‘Demi Allah, kamu telah memutuskan perkara dengan benar’. Umar bin Khattab memukulnya dengan tongkat, lalu berkata; ‘Apa yang kamu ketahui?’ Orang Yahudi itu menjawab; ‘Sungguh kami mendapati bahwa tidak ada seorang hakim yang memutuskan suatu perkara dengan benar, kecuali di sebelah kanan dan kirinya ada malaikat yang akan selalu membenarkannya dan meluruskannya kepada kebenaran, selama dia bersama dengan kebenaran. Manakala dia meninggalkannya maka mereka juga meninggalkannya’*”.

Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan dalam khotbahnya: “*Menghadirkan bukti itu wajib atas orang tertuduh dan mengucapkan sumpah wajib atas orang yang menuntut*”. Hadis ini terdapat cela di dalam sanadnya dan Muhammad bin Ubaidullah di-*dha’if*-kan dalam periwayatan hadis dari sisi hafalannya. Ibnu Al Mubarak dan yang lainnya men-*dha’if*-kannya (HR. At-Tirmidzi).

9 Abdul Wahhab Khalaf, *al-Siyasah al-Syari’ah*, terj. Z. Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 31.



Dari Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslim boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*. Abu Isa berkata; *"hadis ini hasan shahih"* (HR. At-Tirmidzi).

Abdurrahman bin Abu Bakrah mengatakan, Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan yang isinya; *"Jangan engkau mengadili di antara dua orang ketika engkau marah sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 'Seorang hakim dilarang memutuskan antara dua orang ketika marah'"* (HR. Bukhari dan Ahmad).

Dari Ma'qil Al Muzani dia berkata; *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkanku mengadili (perkara) beberapa orang, Kukatakan; 'Betapa bagusnyanya apa yang hendak aku putuskan, wahai Rasulullah' Beliau bersabda: 'Allah akan bersama seorang hakim, selama tidak berbuat curang dengan sengaja'"* (HR. Ahmad).

Hakim dalam Peradilan Islam

Hakim atau *qadli* merupakan sentral dari sistem peradilan mana pun karena ia banyak menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan hingga memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Pentingnya posisi hakim dapat dilihat dari sabda Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa hakim terbagi menjadi tiga kelompok, satu kelompok masuk surga dan dua kelompok lainnya masuk neraka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga; hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan, ia di*



neraka, niscaya kami akan mengatakan, 'Sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga' (HR. Ibnu Majah).

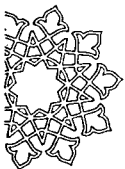
Banyak kesimpulan yang dapat diambil dari sabda Nabi tersebut, salah satunya bahwa jabatan hakim merupakan jabatan yang berat jika dilihat dari tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Dalam hadis lain diungkapkan keharusan hakim bersikap adil.

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa menginginkan untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkan kezalimannya maka baginya surga, dan barangsiapa yang kezalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya neraka"* (HR. Abu Daud).

Dalam sejarah peradilan Islam, orang-orang yang hendak diangkat menjadi hakim, baik pada masa Nabi Saw. maupun pada masa Khulafaur Rasyidin, biasa ditanya tentang dasar pengetahuan mereka dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya, ketika Muadz ibn Jabbal r.a. diutus menjadi hakim atau wakil Nabi Saw. ke Yaman, ia ditanya oleh Nabi tentang apa yang akan menjadi dasar bagi Muadz dalam memutuskan suatu perkara. Ketika jawaban-jawaban Muadz sangat memuaskan hati, Nabi Saw. menyetujui sekaligus memujinya atas apa yang menjadi pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara.¹⁰

Dari Syu'bah, dari Abu 'Aun, dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: *"Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?"* Mu'adz menjawab, *'Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah'* Beliau bersabda: *'Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?'* Mu'adz menjawab, *'Saya akan kembali kepada sunah Rasulullah*

10 Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. N.I. Al-Barsany, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 19.



shallallahu 'alaihi wasallam'. Beliau bersabda lagi: 'Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?' Mu'adz menjawab, 'Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi'. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah'" (HR. Abu Daud).

Dalam hadis lain, Rasul pernah memerintahkan memutus perkara umat kepada sahabatnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amru' bin Ash:

Dari Abdullah bin Amru dari Amru bin Ash ia berkata, "Dua orang yang saling bersengketa datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada Amru: 'Wahai Amru, putuskanlah perkara antara keduanya'. Amru berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau lebih layak untuk itu dari saya'. Beliau bersabda: 'Meskipun begitu'. Amru bertanya, 'Jika saya memutuskan perkara antara keduanya, maka ganjaran apakah yang akan saya terima?' Beliau menjawab: 'Jika kamu memutuskan perkara antara keduanya dan benar, maka bagimu sepuluh kebaikan. Jika kamu telah berijtihad lalu salah dalam memutuskan, maka bagimu satu kebaikan'" (HR. Ahmad).

Al-Mawardi (w. 450 H), seorang jurist Islam pada masa Abbasiyah, dalam bukunya, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*, menulis satu bab tentang kedudukan hakim. Menurutnyanya, ada tujuh syarat untuk menjadi seorang hakim, yaitu:

1. Laki-laki.
2. Memiliki pengetahuan tentang hal-hal penting untuk diketahui sehingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, jauh dari lupa atau lalai.
3. Merdeka.
4. Islam.
5. Adil: kriteria adil, yaitu berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol emosinya ketika marah atau senang, memiliki sifat *muruah*.



6. Sehat pendengaran dan penglihatan. Dengan pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pendakwa dan terdakwa, membedakan antara yang mengaku dan pihak yang tidak mengaku, membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta mengenali pihak yang benar dan yang salah.
7. Mengetahui hukum-hukum syariat, baik *ushul* maupun *furu*-nya. Yang termasuk dasar ilmu syariat ada empat, yaitu: (a) mengetahui Kitabullah dengan benar; (2) mengetahui sunah Rasulullah Saw. yang eksis; (3) mengetahui penafsiran para generasi salaf dalam *ittifaq* dan *ikhtilaf* mereka, agar ia bisa ber-*hujah* dengan *ijma* mereka dan ber-*ijtihad* dengan pendapatnya sendiri dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan; serta (4) mengetahui *qiyas* yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah (*furu*) yang tidak disebutkan dalam *nash* kepada asalnya yang disebutkan dalam *nash* sehingga ia mendapatkan jalan untuk mengetahui ilmu tentang kasus-kasus aktual dan membedakannya antara yang benar dan batil.¹¹

Salam Madkur, dosen Universitas Kairo, dengan mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh para *fukaha* sebelumnya, menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam Islam, antara lain:

1. Laki-laki.
2. Berakal (sehat dan cerdas pikirannya).
3. Islam.
4. Adil.
5. Memiliki pengetahuan hukum agama, baik dasar maupun cabangnya.
6. Sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan.¹²

Syarat untuk menjadi hakim yang diberikan Al-Mawardi dan Salam Madkur adalah sama, kecuali syarat merdeka dalam rumusan Salam Madkur tidak masuk karena memang kondisi sosial yang sudah berbeda.

11 Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 65-66.

12 Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 53-60.



Pada bagian lain, Al-Mawardi memerinci etika bagi seorang hakim, yaitu:

1. Hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari seseorang warga di daerah kerjanya, meskipun orang tersebut tidak mempunyai lawan dalam satu perkara karena bisa jadi ia bertindak tidak adil dalam jabatannya.
2. Hakim tidak diperbolehkan menunda keputusan dua pihak yang berperkara, kecuali karena *udzur syari*.
3. Hakim tidak boleh menyembunyikan diri (bersitirahat), kecuali pada waktu istirahat.
4. Hakim tidak diperbolehkan menangani perkara salah seorang dari kedua orang tuanya, atau salah seorang dari anak-anaknya, karena hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan orang banyak. Ia juga tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi mereka atau menjadikan mereka sebagai saksi.¹³

Teori Keadilan dalam Islam

Berbuat adil tidak hanya menjadi tanggung jawab para hakim atau para *qadli* yang duduk di lembaga peradilan, tetapi menjadi kewajiban bagi setiap orang dalam berbuat dan bertindak, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *‘adl*. Dalam bahasa Indonesia, adil berarti (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) tidak sewenang-wenang. Kata adil juga merupakan antonim atau kebalikan dari *zalim*.

Dalam Al-Quran, kata adil diungkapkan dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al-‘adl* berarti sama, yaitu memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kata adil dan sikap adil, di antaranya QS. An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

13 Al-Mawari, *op.cit.*, hlm. 75.



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Sementara itu, *al-qisth* berarti bagian yang wajar dan patut. Ini tidak harus mengantarkan kepada adanya persamaan. Karena itu, kata *qisth* lebih umum daripada kata '*adl*'. Kata *al-qisth* dan *al-'adl* selalu beriringan dalam satu ayat, seperti dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan QS. Al-Maidah ayat 8:

"Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. An-Nisa [4]: 3).

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah [5]: 8)

Adapun kata *al-mizan* berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan, tetapi dapat juga berarti keadilan. Kata *al-mizan* di antaranya terdapat dalam QS. Al-Rahman ayat 8-9:

"Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu" (QS. Al-Rahman [55]: 8-9).

Selain itu, ada pula ayat Al-Quran yang mengandung ketiga kata tersebut (*al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*) dalam satu ayat, di antaranya QS. Al-Anam ayat 152:



"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat" (QS. Al-Anam [6]: 152).

Ketiga kata tersebut (*al-'adl*, *al-qisth* dan *al-mizan*), dalam Islam, menjadi perintah kepada manusia untuk berbuat dan menegakkan keadilan, seperti tercantum dalam beberapa firman-Nya: *"Katakanlah, 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan...'"* (QS. Al-Araf ayat 29); *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."* (QS. An-Nahl ayat 90); dan *"Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"* (QS. Al-Rahman ayat 8-9).

Quraish Shihab menguraikan konsep keadilan dalam Al-Quran menjadi empat bagian, yaitu:

1. Adil dalam arti sama

Dalam konteks ini, adil berarti memperlakukan orang lain secara sama, tidak membedakan. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, bersikap adil dalam memutuskan mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat berperkara atau mengambil keputusan serta memperlakukan sama pada semua orang. Ayat tersebut menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan pengaduan dan pembelaan mereka. Al-Quran mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Daud As. untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki 99 ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki satu ekor. Pemilik kambing pertama mendesak kepada pemilik kedua yang hanya memiliki satu ekor untuk memberikan kambingnya agar



kambing miliknya menjadi genap seratus ekor. Dalam memutuskan perkara tersebut, Nabi Daud As. hanya memutuskan bahwa pemilik pertama telah berbuat aniaya atau zalim kepada pemilik kedua (QS. Shad ayat 21-24).

2. Adil dalam arti seimbang

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat, kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya, seperti tertera dalam QS. Al-Infithar ayat 6-7.

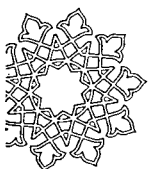
Dalam konteks ini, keadilan identik dengan kesesuaian dan keselarasan atau proporsionalitas, bukan lawan kata dari kezaliman. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar—kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Misalnya, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris serta persaksian, harus dilihat dalam konteks keseimbangan, bukan persamaan.

3. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya

Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak milik pihak lain melalui jalan terdekat. Lawannya adalah kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyiram tumbuhan adalah keadilan.

4. Adil dinisbahkan kepada Ilahi

Dalam konteks ini, adil berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi, dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung



konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Sering dinyatakan bahwa ketika A mengambil hak dari B, pada saat itu juga B mengambil haknya dari A. Kaidah tersebut tidak berlaku untuk Allah Swt. karena Dia memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman-Nya yang menunjukkan bahwa Allah Swt. sebagai *qaiman bilqisth* (yang menegakkan keadilan) (QS. Ali Imran ayat 18). Atau pada ayat lain yang mengandung arti keadilan-Nya, seperti QS. Fushilat ayat 46.¹⁴

Teori keadilan kedua dikemukakan oleh Abdul Aziz Sachedina. Ia menjelaskan bahwa keadilan dipandang sebagai suatu konsep yang relatif. Bila seseorang menyatakan keadilan apa yang dianggapnya adil, hal tersebut harus relevan dengan tatanan sosial yang mapan. Di bawah tatanan tersebut, diakui suatu skala keadilan tertentu.

Skala keadilan berbeda di setiap budaya. Masing-masing skala didefinisikan dan pada akhirnya ditentukan oleh masing-masing masyarakat berdasarkan tatanan sosialnya. Namun, bagaimanapun skala satu sama lain, tampaknya mempunyai beberapa unsur yang sama, yang kita sebut watak objektif universal kebajikan moral. Dalam tatanan sosial, ada dua kecenderungan yang dipakai dalam menentukan bagaimana skala-skala keadilan yang dipahami oleh masyarakat. Sekelompok masyarakat percaya bahwa manusia mampu menetapkan kepentingan-kepentingan individu dan kolektif mereka. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa mereka memiliki kapasitas bawaan, secara individu dan kolektif, untuk mendirikan tatanan sosial dengan skala keadilan yang sesuai yang diabadikan dalam persetujuan tak terucap atau persetujuan resmi. Keadilan seperti ini merupakan hasil interaksi antara harapan-harapan sosial atau individu dan kondisi-kondisi sosial moral yang ada, atau dapat disebut keadilan positif. Karena positif, ia tidak menyatakan

14 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 113-117.



sempurna dan selalu ada usaha terus-menerus dari masyarakat untuk memperbaikinya. Keadilan yang ideal adalah khayalan belaka, sedangkan keadilan riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi.

Kecenderungan lain menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu lemah dan karenanya tidak mampu berbuat sempurna sebab ia memiliki kekurangan-kekurangan personal. Pemikiran bahwa manusia yang kerap berbuat salah dapat menetapkan kepentingan-kepentingan mereka bersama dan menentukan standar keadilan yang tidak memihak adalah hampir tidak diterima. Dalam masyarakat seperti itu, bimbingan Ilahi diminta untuk memberikan sumber-sumber norma dasar dan prinsip-prinsip organisasi sosial. Keadilan semacam itu yang datang dan yang dilakukan oleh wakil otoritas Ilahiah di muka bumi, yaitu Nabi. Keadilan Ilahiah yang datang dari Nabi mendapat penghormatan dan dapat mempunyai pengaruh kuat yang abadi dalam masyarakat. Keadilan seperti itu dianggap dapat diterapkan oleh seluruh umat manusia. Begitu pula gagasan keadilan Islam, pada pokoknya menjadi kategori kedua, yaitu keadilan Ilahiah.¹⁵

Teori keadilan ketiga diberikan oleh Ibn Miskawaih (w. 1030 M), seorang filsuf etika beraliran Aristotelian dan penulis kitab *Tahzib al-Akhlaq*. Menurut Ibn Miskawaih, keadilan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) menurut alam, (2) menurut adat istiadat yang berlaku, dan (3) menurut Ilahiah. Ibn Miskawaih menggambarkan teori keadilannya dalam suatu pemikiran filsafat yang rumit. Keadilan alam, menurutnya, adalah "bila Anda membayangkan suatu garis lurus sebuah balok sejajar dan membaginya dengan memberi titik pada dua bagian yang sama, kemudian memberikan sebuah pengait agar Anda dapat menggantung garis atau balok itu, pasti akan tetap paralel pada horizon tanpa mengubah posisinya dan tanpa salah satu bagian berlebih di atas yang lainnya. Jika perbedaan zat adalah sama dalam kualitas agar terdapat suatu keseimbangan atau

15 Abdulaziz A. Sachedina, "Penciptaan Tatahan Sosial yang Adil dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.) *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 154.



keadilan padanya, benda-benda itu juga akan menjadi dan sebangun dengan keutuhan serta zat. Sebagai contoh, tanah dan air berbeda dalam zat, tetapi jika Anda mengambil jumlah tertentu dengan kuantitas yang sama, mungkin akan menjadi sama dalam berat keduanya. Jika dua benda berbeda zat dan kuantitas, tetapi sama berat, setiap zat tersebut akan memelihara keseimbangan di antara benda-benda itu, dan inilah keadilan alam.¹⁶

Keadilan menurut adat istiadat terbagi menjadi dua, yaitu keadilan khusus dan keadilan umum. Keadilan umum adalah sesuatu yang sedang berlangsung yang semua orang menyetujuinya. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan yang berlaku dan disetujui oleh bangsa-bangsa berbeda, dalam negara-negara berbeda, disepakati dalam kota-kota yang berbeda dan pribadi-pribadi yang berbeda, yang mereka anggap sebagai ikatan yang memberikan kesamaan hak.¹⁷

Teori keadilan keempat datang dari Aristoteles (382-322 SM), seorang filsuf Yunani kuno yang ajarannya banyak memengaruhi para filsuf muslim. Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan suatu perlakuan kepada seseorang menurut jasa yang dilakukannya. Ia tidak menuntut tiap-tiap orang agar mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara persorangan khusus, sedangkan keadilan distributif menguasai hubungan antara masyarakat, khususnya negara.¹⁸

Manusia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai dan aman. Akan tetapi, realitas kehidupan tidak selamanya sejalan dengan idealisme yang diinginkan manusia. Interaksi antarmanusia ternyata banyak pula menimbulkan ketidaksepahaman dan ketidaksejalan yang

16 M.S. Khan, *Treatise of Miskawiah on Justice*, terj. Jaenudin dan Ahmad Jakia, (Bandung: AlManar Press, 2009), hlm. 25.

17 Ibid., hlm. 27.

18 L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 23.

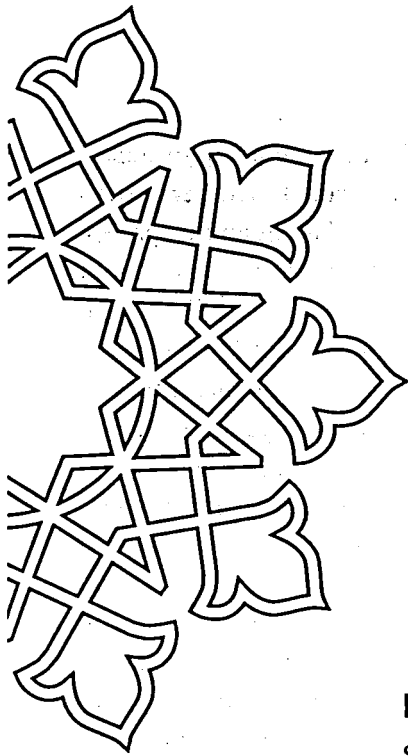


berakibat pada hilangnya kedamaian serta keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mewujudkan keadilan, manusia memerlukan perangkat agar dapat menegakkan kembali rasa keadilan dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali sesuai dengan cita-citanya. Peradilan merupakan instrumen yang dimiliki masyarakat untuk memelihara keadilan, tidak terkecuali dalam masyarakat Islam. Peradilan dalam Islam tidak hanya berangkat dari kesadaran norma masyarakat, tetapi lebih tinggi, yaitu berdasar dari tuntunan Ilahi, Allah Swt dan Rasul-Nya, sehingga peradilan diwujudkan dalam Islam tidak hanya memenuhi rasa keadilan secara adat-istiadat, tetapi juga memenuhi cita-cita keadilan yang dikehendaki oleh Allah Swt. *Wallahu 'alam bisshawab*.

Latihan

1. Jelaskan bagaimana peradilan dalam Islam!
2. Jelaskan dan gambarkan hakim dalam peradilan Islam!
3. Jelaskan yang Anda ketahui tentang teori keadilan dalam Islam!





2

Metode Pengkajian Peradilan Islam

Pendahuluan

Salah satu bidang ilmu agama Islam yang dikembangkan dalam lingkungan perguruan tinggi ialah hukum Islam dan pranata sosial yang terdiri atas berbagai bidang studi, di antaranya peradilan Islam (*al-qadha' fi al-Islam*) yang mendapat perhatian cukup besar di kalangan *fuqaha* dan para pakar di bidang lain. Demikian halnya peradilan Islam di Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai peradilan agama, mendapat perhatian dari kalangan pakar hukum Islam, hukum tata negara, sejarah, politik, antropologi, dan sosiologi. Ia menjadi sasaran pengkajian yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian, monografi, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Hasil pengkajian tersebut sebagian diterbitkan dan disebarluaskan.



Di samping itu, peradilan Islam menjadi bahan pengkajian dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun di kalangan pembina badan peradilan dan organisasi profesi di bidang tersebut. Publikasi hasil pengkajian dapat ditemukan dalam berbagai kumpulan karangan dan jurnal. Ia akan tetap menarik sebagai sasaran pengkajian, khususnya di Indonesia, karena memiliki keunikan tersendiri sebagai satu-satunya institusi keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan sendirinya, muncul tuntutan pemetaan wilayah pengkajian dan metode yang tepat untuk digunakan. Bahkan, membutuhkan perumusan model pengkajian yang jelas agar pengkajian peradilan Islam dapat dilakukan secara berkesinambungan dan produknya mendekati gambaran yang sebenarnya.

Pengkajian peradilan Islam membutuhkan pembatasan wilayah pengkajian, sebagaimana bidang pengkajian yang lain. Pembatasan itu sekaligus menunjukkan ruang lingkup wilayah pengkajian peradilan Islam. Hal itu memberi kemungkinan untuk menentukan berbagai wilayah penelitian (*research areas*) dan masalah-masalah penelitian (*research problems*), serta metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam pengembangan pengkajian peradilan Islam. Dalam pengkajian, wilayah pengkajian dan metode pengkajian (penelitian) merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi serta saling bergantung. Dengan kata lain, unsur-unsur informasi (*al-maddah*) dan unsur-unsur metodologi (*al-thariqah*) dalam pengkajian peradilan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan basis dan penggerak dalam pengembangan pengkajian peradilan Islam. Manakala kedua unsur itu dipisahkan, ia akan menjadi beku. Akibatnya, pengkajian peradilan Islam akan selalu berjalan di tempat, tanpa gerak dan perkembangan.

Pembatasan atau ruang lingkup wilayah pengkajian peradilan Islam bertitik tolak dari tiga landasan keilmuan, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pembatasan itu tercermin dalam jawaban terhadap tiga pertanyaan pokok, yakni apa yang dikaji dari peradilan Islam? Bagaimana cara pengkajian peradilan Islam? Untuk apa pengkajian dilakukan?



Pertanyaan pertama berkenaan dengan objek pengkajian peradilan Agama di Indonesia sebagai bagian peradilan Islam. Pertanyaan kedua berkenaan dengan metode yang tepat dan melekat dalam pengkajian peradilan Islam, yang secara operasional adalah metode penelitian. Pertanyaan ketiga berkenaan dengan kegunaan atau signifikansi hasil pengkajian peradilan Islam, baik untuk pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan yang bersifat praktis.

Peradilan Islam, khususnya peradilan Islam Indonesia, dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, sebagai pranata hukum atau bagian dari pranata sosial yang bercorak keislaman dalam sistem masyarakat Indonesia. Ia memiliki hubungan fungsional dan timbal balik dengan pranata hukum dan pranata lainnya. *Kedua*, sebagai salah satu bidang pengkajian dalam fikih dan ilmu hukum, yang berada dalam lingkungan sistem keilmuan. Ia merupakan bagian dari pranata keilmuan yang berfungsi menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi pranata sosial, yang dalam hal ini adalah pranata peradilan Islam. Sebagai pranata keilmuan, peradilan Islam menjadi anggota rumpun ilmu-ilmu budaya (*humanities*), namun memiliki hubungan yang erat dengan rumpun lainnya, khususnya ilmu-ilmu sosial (*social sciences*).

Ruang lingkup pengkajian peradilan Islam berasal dari konsep yang digunakan. Ia bertitik tolak dari pengertian yang dirumuskan, berbagai unsur yang tercakup di dalamnya, dan relasinya dengan konsep lain.

Dalam pengkajian peradilan Islam, terdapat berbagai konsep yang digunakan. Konsep itu merupakan suatu gagasan (*ide*) yang dilambangkan oleh suatu istilah tertentu, sesuai dengan bahasa yang digunakan. Ada dua istilah yang berasal dari kata dasar yang sama, tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu peradilan dan pengadilan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki beberapa pengertian, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara. Peradilan merupakan salah satu



pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan yang mengacu pada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi atau badan atau lembaga yang menyelenggarakan hukum dan keadilan tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, wilayah pengkajian peradilan Islam adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengkajian peradilan meliputi:¹

1. Kekuasaan negara (bahkan antarnegara), yaitu kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
2. Kekuasaan dilaksanakan oleh badan peradilan, yakni pengadilan sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman.
3. Kekuasaan yang melekat pada pengadilan terdiri atas kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif.
4. Pengadilan tersusun secara hierarkis, yakni pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir.
5. Susunan pengadilan terdiri atas pimpinan dan pelaksana.
6. Unsur pelaksana dalam pengadilan terdiri atas hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan.
7. Perkara yang tercakup dalam kekuasaan meliputi perkara perdata dan perkara lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Orang-orang yang beragama Islam (juga badan hukum yang menundukkan diri kepada hukum Islam secara sukarela), sebagai pihak yang berperkara, yang kemudian dikenal sebagai para pencari keadilan.

1 Cik Hasan Bisri. Rabu, 14 Maret 2012 dalam pertemuan ketujuh Kelompok Pengajar Peradilan Islam dibahas "Model Pengkajian Peradilan Islam" (diunduh pukul 19.30 WIB. Senin, 16-09-13 dari <http://www.fshuinsgd.ac.id/?p=770>).



9. Hukum substantif yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara adalah hukum Islam.
10. Untuk menerapkan hukum substantif tersebut, dilaksanakan dengan merujuk pada hukum acara (hukum prosedural).
11. Prosedur ber perkara di pengadilan, meliputi tahapan penerimaan, pemeriksaan, penyidikan, pemutusan, dan penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan.
12. Produk pengadilan atas perkara tersebut berupa keputusan pengadilan, yakni putusan dan penetapan.
13. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan penyelenggaraan peradilan.
14. Aspek-aspek administratif dalam penyelenggaraan peradilan, yakni dukungan administrasi peradilan dan administrasi umum.

Wilayah pengkajian peradilan Islam berhubungan erat dengan wilayah lainnya, di antaranya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, struktur dan pola budaya masyarakat Indonesia, sistem dan politik hukum di Indonesia, serta pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya pengkajian peradilan Islam yang bersifat kompleks tersebut dilakukan dengan metode keilmuan, yaitu suatu pemahaman terhadap gejala-gejala peradilan Islam dengan menggunakan penalaran ilmiah yang didasarkan pada cara berpikir logis.

Dengan ruang lingkup wilayah pengkajian peradilan Islam yang kompleks tersebut, perlu dipahami juga beberapa pokok pembahasan, antara lain:

1. Perkembangan singkat hukum Islam di Indonesia dan transformasinya ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Perkembangan singkat peradilan Islam pada masa kesultanan Islam, penjajahan, kemerdekaan, hingga sekarang.
3. Peradilan agama dalam tata peradilan di Indonesia dewasa ini.
4. Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
5. Kekuasaan dalam lingkungan peradilan agama.



6. Tata cara perkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7. Prospek peradilan agama dalam masyarakat Indonesia.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pengkajian peradilan Islam meliputi wilayah yang sangat luas. Ruang lingkup tersebut sekaligus menunjukkan batasannya yang secara teknis, dalam penelitian, disebut wilayah penelitian (*research area*).

Peradilan merupakan salah satu pranata hukum sekaligus pranata sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, peradilan berhubungan secara timbal balik dengan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping itu, peradilan Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak Islam menjadi kekuatan politik dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam secara umum. Dapat dilihat bahwa:²

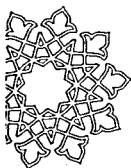
1. Peradilan Islam dan politik di Indonesia

Perkembangan peradilan Islam di Indonesia tidak terlepas dari politik dan penguasa yang sedang berkuasa. Hal tersebut dipengaruhi dari penyebaran umat Islam di berbagai negara dan kawasan. Corak dan perkembangan peradilan Islam sejalan dengan struktur, pola budaya, dan perkembangan masyarakat Islam di negara-negara yang bersangkutan. Demikian halnya di Indonesia, peradilan Islam mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan umat Islam, komunitas terbesar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peradilan Islam pada masa kesultanan Islam, penjajahan, dan kemerdekaan bersifat majemuk. Kemajemukan peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari segi penyebutannya secara resmi (*tetelateur*), kedudukannya dalam sistem peradilan secara keseluruhan, susunan organisasi pengadilan, hierarki instansial pengadilan, cakupan kekuasaannya, dan hukum acara yang berlaku di dalamnya.

2. Islam menjadi kekuatan politik

Dalam perjalanannya, muncul berbagai pemikiran tentang Islam dalam berbagai bidang dan pranata sosial yang bercorak keislaman.

2 <http://kancanaasli.blogspot.com/2009/09/perkembangan-peradilan-islam-di.html> (diunduh pukul 19.30 WIB. Senin, 16-09-13).



Salah satu bagian dari pemikiran itu adalah bidang hukum Islam (*fiqh*), sedangkan pranata sosial yang bercorak keislaman adalah peradilan Islam. Dengan berkembangnya masyarakat Islam, lahir lah kerajaan-kerajaan Islam yang kelak menjadi kekuatan politik, yang di dalamnya terdapat peradilan Islam. Penyebutan, kedudukan, susunan, serta kekuasaan satuan penyelenggara peradilan Islam, yaitu pengadilan pada masa kesultanan Islam sangat beraneka ragam, contohnya pada masa Kesultanan Mataram, ada pengadilan serambi karena diselenggarakan di serambi masjid agung.

Berkenaan dengan penentuan wilayah dan penelitian, diperlukan pemilihan dan penggunaan pendekatan serta metode pengkajian yang tepat. Tepat dalam pengertian sesuai dengan ruang lingkup masalah yang dikaji, dan tepat dalam pengertian sesuai dengan karakteristik bidang pengkajian. Selanjutnya dilakukan adaptasi dan modifikasi metode pengkajian, khususnya metode penelitian yang lazim digunakan. Kemudian disusun langkah-langkah operasional, sebagaimana yang lazim digunakan dalam perencanaan penelitian. Semua langkah itu dimasukkan dalam bentuk atau model pengkajian.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pengkajian peradilan Islam. *Pertama*, pendekatan normatif-moralistik. Peradilan Islam dideduksi dari ayat Al-Quran dan hadis, serta peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, atau dirujuk dari doktrin para ahli, termasuk *fuqaha*. *Kedua*, pendekatan antropologis atau pendekatan sosiologis. Peradilan Islam diinduksi dari suatu realitas, sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Kedua pendekatan itu masing-masing memiliki kelebihan dan sekaligus merupakan kekurangannya.

Pendekatan pertama lebih mudah digunakan karena memiliki pola yang telah baku, yaitu aspek normatif tentang peradilan. Pola tersebut dapat dijadikan patokan untuk melakukan penilaian terhadap peradilan Islam. Dengan demikian, dapat dilakukan pengkajian evaluasi untuk mengukur “apa yang senyatanya” (*das sein*) yang bersifat aktual diukur dengan “apa yang seharusnya” (*das sollen*) yang bersifat ideal. Bila terdapat perbedaan



atau kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, dengan mudah dapat dinyatakan bahwa “yang senyatanya” adalah inkonsisten atau salah dan menyimpang. Atau sebaliknya, terjadi idealisasi peradilan Islam karena tuntutan ideologis atau “pembelaan” sehingga terjadi kemencengan yang sangat menonjol. Ia kehilangan objektivitasnya dan mengabaikan akurasi.

Pendekatan kedua memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan, bahkan untuk menjelaskan gejala peradilan Islam menurut sudut pandang antropologis atau sosiologis. Ia mampu menjelaskan mengenai aspek-aspek yang statis dan dinamis yang berkaitan dengan lingkungannya yang lebih luas. Cukup banyak teori, bahkan paradigma, yang dapat digunakan dalam pendekatan ini. Namun demikian, ia “kehilangan jejak” dalam menjelaskan hubungan *das sollen* dan *das sein* yang bertitik tolak dari keyakinan yang kemudian terwujud dalam pranata hukum serta pranata sosial. Ia tidak mampu memberikan makna terhadap gejala empiris yang selayaknya dihayati.

Di samping itu, pengkajian peradilan Islam dapat digunakan dengan “mengawinkan” kedua pendekatan tersebut. Pendekatan pertama digunakan untuk memahami “apa yang seharusnya”, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh *fuqaha* dalam pengkajian peradilan Islam dan para ahli hukum dalam pengkajian hukum serta peradilan pada umumnya. Pendekatan kedua dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan “apa yang senyatanya”, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial. Dengan cara demikian, “apa yang seharusnya” dan “apa yang senyatanya” dipandang sebagai suatu gejala kontinum yang berkesinambungan, bukan sebagai gejala dikotomis.

Selanjutnya, dilakukan adaptasi dan modifikasi dari metode penelitian yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu budaya, terutama dalam ilmu-ilmu sosial. Terdapat berbagai metode penelitian yang dapat diadaptasi dan dimodifikasi, di antaranya metode penelitian hukum, metode penelitian sejarah, metode penelitian survei, metode penelitian studi kasus, metode penelitian evaluasi, dan metode penelitian analisis isi.

Dengan pendekatan-pendekatan dan modifikasi metode penelitian, Peradilan Islam dapat dipahami, digambarkan, dan dijelaskan menurut kerangka



berpikir tertentu yang didasarkan pada satu atau beberapa teori tertentu dan untuk tujuan tertentu. Berkenaan dengan hal itu, pengkajian peradilan Islam di Indonesia dapat dilakukan dengan beragam model atau bentuk. Pengkajian peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya:

1. Pengkajian aspektual
Pengkajian ini dititikberatkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam wilayah penelitian internal, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.
2. Pengkajian relasional
Pengkajian ini dititikberatkan pada hubungan antara peradilan Islam dan pranata hukum serta pranata sosial lainnya, atau dengan sistem sosial secara makro.
3. Pengkajian sosio-historis
Pengkajian ini dititikberatkan pada kronologi pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam dalam suatu rentangan waktu tertentu atau dalam suatu kawasan kebudayaan lokal tertentu.
4. Pengkajian sistemik
Pengkajian ini dititikberatkan bahwa peradilan merupakan suatu kesatuan terintegrasi yang terdiri atas berbagai unsur.
5. Pengkajian perbandingan
Pengkajian ini dititikberatkan pada unsur-unsur persamaan, perbedaan, dan hubungan antarperadilan Islam, baik di berbagai kawasan di Indonesia (pra-UU Nomor 7 tahun 1989) maupun di berbagai kawasan atau negara lain.
6. Pengkajian analisis yurisprudensi
Pengkajian ini dititikberatkan pada pembahasan isi keputusan peradilan Islam, baik putusan maupun penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Adapun metode pengkajian peradilan, dalam buku *Perkembangan Peradilan Islam (Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia)* karangan Oyo Sunaryo Mukhlis, di antaranya:³

3 Oyo Sunaryo Mukhlis. *Perkembangan Peradilan Islam (Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. Hlm. 10-12.



1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu pengkajian yang mengaplikasikan metode penelitian ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Pendekatan tersebut memiliki tujuan mengonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif.⁴
- b. Pendekatan falsafi, yaitu pendekatan normatif yang didasarkan pada hasil pemikiran ulama, sarjana, ilmuwan, dan tokoh tertentu.
- c. Pendekatan komparatif, yaitu suatu upaya mengetahui dan memahami norma serta perkembangan praktik peradilan dengan melakukan perbandingan menurut waktu dan ruang.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dikonsentrasikan pada penelitian kancah yang berkenaan dengan penerapan dan pelaksanaan peradilan.

Secara teknis pengkajian peradilan Islam dilaksanakan dalam kegiatan penelitian melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Perumusan masalah penelitian

Secara sederhana, masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai hubungan antarunsur sebagai suatu kesatuan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Ia dirumuskan melalui tahapan-tahapan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pernyataan masalah. Tahapan itu dirumuskan dengan kalimat-kalimat deskriptif. Kemudian diajukan beberapa pertanyaan penelitian yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, dirumuskan tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai.

b. Pengkajian bahan pustaka

Pengkajian terhadap berbagai bahan bacaan, termasuk hasil penelitian, yang relevan dengan masalah penelitian. Dari hasil pengkajian itu tergambar tentang berbagai teori dan konsep yang pernah dirumuskan serta digunakan, dan perkembangan pengkajian yang pernah dilakukan.

4 Winarno Surakhmad. *Dasar-dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito. 1997. Hlm. 132.



c. Perumusan kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu cara menggunakan teori dalam penelitian. Hubungan antar atau dalam suatu teori, atau antarkonsep dijadikan landasan kerja dalam tahapan penelitian berikutnya.

d. Pemilihan metode penelitian

Metode penelitian yang dipilih adalah yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena metode penelitian peradilan Islam belum dirumuskan secara khusus, dapat dilakukan adaptasi dan modifikasi dari metode penelitian yang telah ada.

e. Penentuan sumber data

Ada yang berupa bahan bacaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen, antara lain putusan pengadilan, penetapan pengadilan, berita acara persidangan, dan laporan pengadilan. Sumber tersebut selama ini banyak digunakan dalam penelitian. Ada yang berupa manusia, yaitu informan atau responden, seperti ketua pengadilan, hakim, panitera, dan pihak-pihak yang berperkara. Di samping itu, ada yang berupa peristiwa dan perilaku manusia, seperti dalam perkara di pengadilan.

f. Pengumpulan data

Pengumpulan data dari sumbernya dapat dilakukan dengan berbagai cara (metode). Data dari sumber bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen, dikumpulkan dengan cara penelaahan terhadap isi bahan tertulis. Data yang bersumber dari informan dan responden dikumpulkan dengan cara wawancara atau pengajuan daftar pertanyaan atau wawancara kepada sumber data.

g. Analisis data

Data yang telah terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan (dipilih dan dipilah) berdasarkan kategori tertentu. Kemudian antardata itu dihubungkan (simetris atau asimetris atau resiprokal), yang diacu pada tujuan penelitian. Dari hubungan antarkelas data itu dan mengacu pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan,



dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan dihubungkan atau dibandingkan dengan hasil penelitian lain tentang masalah yang sama.

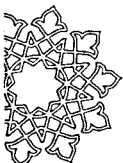
h. Penulisan laporan penelitian

Penulisan laporan penelitian menggunakan tata cara yang lazim dalam penulisan karya ilmiah. Secara garis besar, laporan meliputi tiga bagian, yaitu bagian muka (suplemen awal), bagian utama (naskah laporan), dan bagian belakang (suplemen akhir). Sedangkan bagian utama laporan, umumnya terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, data dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya hasil penelitian dikomunikasikan dalam pertemuan ilmiah, yaitu seminar hasil penelitian dan penerbitan hasil penelitian (ringkasan maupun lengkap).

Secara makro, pengkajian peradilan Islam berhubungan dengan pengkajian tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan perkembangan hukum Islam merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara terus-menerus dalam rentang waktu yang panjang dan dalam berbagai lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian peradilan Islam meliputi *tarikh tasry'*.

Pengkajian peradilan Islam berhubungan dengan penerapan hukum Islam di dalam masyarakat, baik melalui infrastruktur masyarakat maupun melalui suprastruktur masyarakat. Oleh karena itu, peradilan Islam berhubungan dengan pengkajian *siyasa syar'iah*. Perkembangan hukum Islam dan penerapannya di dalam masyarakat berhubungan dengan struktur dan pola budaya masyarakat Indonesia. Peradilan Islam mengalami keragaman dan perubahan karena terjadi interaksi dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Oleh karena itu, pengkajian peradilan Islam berhubungan dengan pengkajian di bidang sosiologis dan antropologis bahkan ilmu politik.

Pengkajian peradilan merupakan salah satu rangkaian pengkajian peradilan Islam (*al-Qadha fi al-Islam*), sebagaimana dilakukan oleh *fuqaha*. Ia merupakan lanjutan dan pengembangan dari pengkajian itu.



Pengkajian peradilan juga berhubungan dengan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya. Peradilan Islam berhubungan dengan pengkajian hukum perkawinan, hukum kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, sedekah, dan ekonomi *syariah*. Oleh karena itu, hukum dirujuk, antara lain dari produk pemikiran *fuqaha* maka pengkajian peradilan Islam berhubungan dengan bidang *fiqh munakahat*, *fiqh mawaris*, *fiqh mu'amalah*.

Di samping itu, pengkajian peradilan Islam juga mencakup organisasi dan administrasi badan peradilan Islam dalam tata peradilan Indonesia. Peradilan Islam berhubungan dengan penerapan sistem organisasi kompleks dan manajemen modern. Oleh karena itu, pengkajian peradilan Islam berhubungan dengan pengkajian dalam bidang hukum tata negara dan manajemen.

Pengkajian peradilan Islam memiliki beberapa kegunaan. *Pertama*, berguna untuk mengembangkan ilmu agama Islam, khususnya di bidang fikih dan pranata sosial. *Kedua*, berguna untuk dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh pembina badan peradilan agama dalam merumuskan kebijakan. *Ketiga*, berguna untuk mengembangkan profesi di bidang peradilan Islam, bagi profesi hakim, panitera, dan sebagainya.

Kegunaan untuk Pengembangan Kebijakan dan Profesi

Hasil pengkajian peradilan Islam juga berguna sebagai salah satu masukan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan peradilan Islam. Selain itu, peradilan Islam juga berguna untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan hakim dan panitera.

Peradilan Islam dapat dipandang sebagai pranata hukum dan pranata sosial, juga sebagai salah satu bidang pengkajian fikih dan pranata sosial. Pengkajian peradilan Islam meliputi unsur-unsur informasi dan metodologi. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan saling bergantung dalam pengembangan pengkajian peradilan Islam.

Pengembangan model pengkajian peradilan Islam merupakan salah satu kebutuhan. Hal itu memberi arah dan langkah pengkajian secara



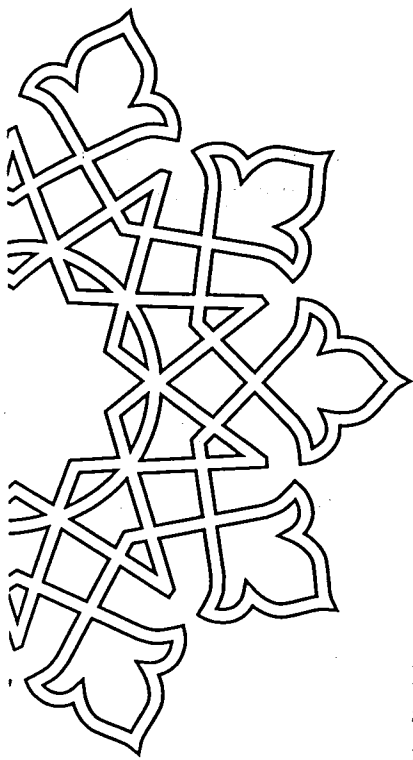
sistematis. Dengan demikian, hasil pengkajian akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap perbendaharaan pengetahuan ilmiah.

Upaya ke arah perumusan dan penyempurnaan model pengkajian peradilan Islam merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Ia merupakan penggerak dalam pengembangan ilmu agama Islam, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pengembangan masyarakat.

Latihan

1. Jelaskan bagaimana metode pengkajian peradilan Islam!
2. Jelaskan bagaimana kegunaan teori dan praktik peradilan Islam untuk pengembangan kebijaksanaan dan profesi!





3

Peradilan pada Masa Kesultanan Islam

Pada saat Islam datang, secara perlahan-lahan ajaran Islam diterima oleh masyarakat dan menggeser ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha sebagai agama yang telah ada dan dianut masyarakat Indonesia sebelumnya. Ajaran Islam juga secara berangsur-angsur diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ibadah *mahdhah (habl min Allah)*, *muamalah*, maupun *munakahat*.

Penerimaan dan penerapan hukum Islam dapat dilihat pada masa-masa awal kerajaan Islam. Pada masa kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara (hukum positif).

Peradilan Islam pada Masa Kerajaan Samudera Pasai

Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masehi yang dimulai di kerajaan



Samudera Pasai. Penyiaran Islam dibawa oleh para pedagang dari Hadramaut dan Gujarat India serta sebagian kecil orang-orang Persia. Perkembangan Islam pada masa tersebut lebih dominan terjadi di daerah-daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan, sedangkan di daerah-daerah pedalaman, Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu.

Sejarah Islam mencatat bahwa Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudera Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan tersebutlah Aceh mendapat julukan Serambi Makkah.

Dikarenakan letak geografisnya yang strategis, mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudera Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk:

1. Menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya.
2. Mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan.
3. Mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri.
4. Menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia.

Masa puncak kebesaran Kerajaan Samudera Pasai terjadi pada 1350 M. Kerajaan Samudera Pasai juga berhubungan langsung dengan Kerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan diri dari ancaman Kerajaan Siam yang daerahnya meliputi Jazirah Malaka. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudera Pasai bertambah pesat sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya.

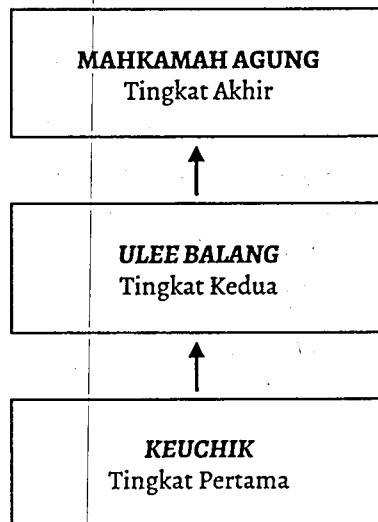
Menurut Hamka, Kerajaan Samudera Pasai mengembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan, setelah Kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M), para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat.



Salah satu pelaksanaan hukum pidana Islam di Kerajaan Samudera Pasai, misalnya hukuman rajam untuk Meurah Pupoek, seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa, bila terbukti melanggar hukum Islam, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh *keuchik*. Pengadilan tersebut hanya menangani perkara-perkara ringan. Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada *ulee balang* (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Faqih (ulama).

Gambar 1
Hierarki Peradilan di Kerajaan Samudera Pasai



Sumber: R. Thresna (1957)



Kerajaan Islam pada Masa Kerajaan Mataram

Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Banyak di antara mereka memeluk agama Hindu. Pada masa Sultan Agung memerintah (1613-1645), hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di Kerajaan Mataram. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan.

Di bawah pemerintahan Sultan Agung, hukum Islam mulai diterapkan dalam tatanan pemerintahan, khususnya dalam sistem peradilan di Mataram. Sultan Agung menerapkannya dalam peradilan pradata. Anggota peradilan pradata terdiri atas orang-orang dari kalangan Islam dan yang mengerti ajaran Islam.

Istilah pengadilan untuk peradilan pradata adalah kisas. Satu istilah yang sebenarnya adalah bahasa aslinya. Kerajaan Mataram tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam. Hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah *bughah* (pemberontakan).

Tidak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung, di pesisir sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon, hukum Islam, utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan, amat banyak berpengaruh. Tercatat, di Priangan, misalnya, adanya pengadilan-pengadilan agama yang mengadili perkara yang dewasa ini masuk ke masalah-masalah subversif. Pengadilan tersebut merupakan suatu peradilan yang mengambil pedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu, yang tentu saja adalah pemuka-pemuka agama di kerajaan.

Sistem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang, diputuskan menurut Undang-Undang Mataram, *Jaya Lengkara*, *Kontra Menawa*, dan *Adilullah*. Walaupun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Papakem Cirebon tersebut telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.

Menurut Tresna (1987: 17-18), Pengadilan Pradata diubah namanya menjadi Pengadilan Serambi karena pengadilan tersebut tidak lagi



mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di serambi masjid agung. Perkara-perkara kejahatan yang menjadi urusan pengadilan ini dinamakan kisas. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Serambi mempunyai arti suatu nasihat (*adpis*) kepada raja di dalam mengambil keputusannya. Pengadilan Serambi mempunyai wewenang, antara lain:

1. Melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan segala akibat, serta masalah kewarisan.
2. Difungsikan sebagai lembaga pemberi nasihat atau sebuah majelis pertimbangan kepada sultan menurut hukum Islam. Jika suatu keputusan sultan yang belum mendapat pertimbangan dari Pengadilan Surambi, keputusan belum dapat dilaksanakan.

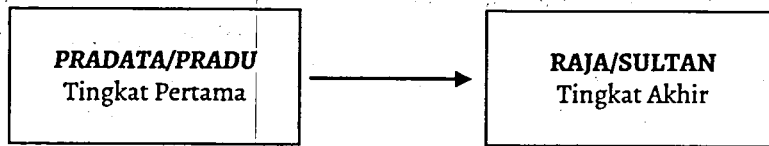
Pimpinan pengadilan, meskipun dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, beralih ke tangan penghulu yang dibantu beberapa ulama sebagai anggota. Ini adalah menyimpang dari bentuk pengadilan menurut hukum Islam, yang hanya mengenal figur hakim seorang diri yang dinamakan *qadhi*. Pengadilan Serambi merupakan suatu majelis, di mana segala keputusan diambil dengan musyawarah.

Susuhunan Amangkurat I yang menggantikan Sultan Agung pada 1645, tidak begitu suka kepada pemuka-pemuka Islam. Oleh karena itu, ia berusaha mengurangi pengaruh alim ulama di dalam pengadilan dengan pengambilalihan kembali tampuk pimpinan pengadilan ke tangannya sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali (Tresna, 1978: 17-18).

Menurut Cik Hasan Bisri (2003: 114), perubahan kebijakan yang dilakukan Amangkurat I tidak menjadikan Pengadilan Serambi tersingkir. Dalam perkembangan berikutnya, Pengadilan Serambi masih menunjukkan keberadaannya sampai masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Menurut Snouck Hurgronje (1973: 21), sebagaimana dikutip Cik Hasan Bisri, pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan.



Gambar 2
Hierarki Peradilan di Kerajaan Mataram

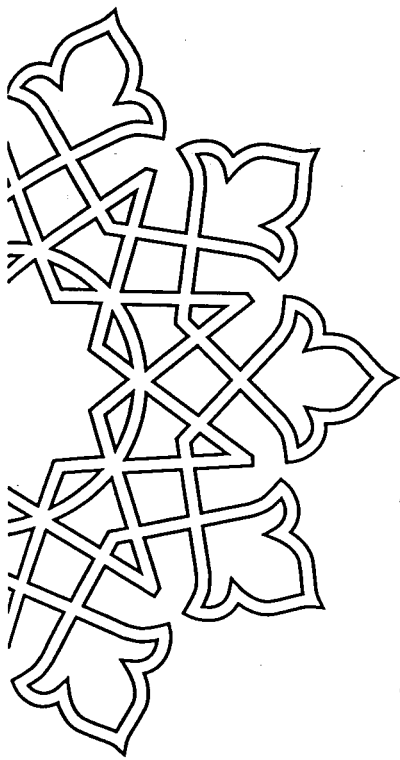


Sumber: R. Thresna (1957)

Latihan

1. Jelaskan bagaimana gambaran peradilan pada masa kesultanan Islam!
2. Jelaskan bagaimana gambaran peradilan Islam pada masa Kerajaan Mataram!





4

Peradilan Agama pada Masa Penjajahan Belanda

Sebelum Belanda melancarkan politik hukum (Islam politik) di Indonesia, Islam mendapat tempat di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim di belahan Nusantara. Islam menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi pengikutnya. Masyarakat pada masa itu dengan rela, patuh, dan tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan tersebut kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme Barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik, bahkan Kristenisasi.

Sebelum Belanda masuk ke Nusantara, sistem politik sudah tertata, seperti hukum Islam yang sudah ada dan sudah dijalankan oleh masyarakat Nusantara. Setelah Belanda



menguasai Nusantara, sistem yang sudah ada mulai dijajah dengan sistem Barat yang dibawa Belanda, di antaranya dibuatlah peraturan-peraturan yang melenceng dari aturan Islam.

Sejarah Penetapan *Staatsblad* 1937 No. 116

Dimulai dari usaha dan cara yang gigih serta sistematis, akhirnya pemerintahan Belanda berhasil mengubah dan mengganti teori *reception in complex*, yang terdapat dalam pasal 78 ayat (2) dan 109 RR (stbl. No. 2) yang kemudian menjadi pasal 134 (2) IS, dengan teori *receptie*. Bersamaan dengan perubahan nama Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, dari RR menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) pada 1919, melalui *Staatsblad* 1929 No. 221, pasal 134 ayat (2) yang baru berbunyi: "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat dan sejauh tidak ditentukan lain oleh *ordonantie*". Arti pasal ini adalah hukum Islam baru berlaku seandainya telah diresepsi oleh hukum adat.

Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi yang tidak menguntungkan perkembangan hukum Islam, khususnya sejak perubahan pasal 134. Perubahan tersebut membuat wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura diperkecil serta dibatasi pada hukum perkawinan saja. Sedangkan perkara waris dialihkan ke pengadilan umum lewat *Staatsblad* 1937 No. 116 dan 610. Sementara di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan *Qadli* dan Kerapatan *Qadli* Besar melalui *Staatsblad* 1937 No. 638 dan 639 yang wewenangnya sama seperti di Jawa dan Madura.

Pada 1922, pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau ulang wewenang Pengadilan Agama, atau yang mereka sebut *priesterrad* atau *raad* agama, di Jawa dan Madura, yang semenjak 1882 memiliki wewenang menangani masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Komisi tersebut dipimpin oleh P.A. Hoesein Djajaningrat. Tugas komisi tersebut adalah memberi rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Alasan peninjauan hukum kewarisan karena belum diterima oleh hukum adat. Melalui pasal 2



ayat (1) *Staatsblad* 1937 No. 116, wewenang mengadili perkara waris dicabut. Menurut Hazairin, sebagaimana dikutip oleh Daud Ali, berdasarkan *Staatsblad* 1937 No. 116, pemerintah Belanda menghalangi dan menghentikan usaha kerajaan Islam di Jawa untuk menyebarkan hukum Islam sejak 1 April 1937.

Dasar Ditetapkannya *Staatsblad* 1937 No. 116

Berdasarkan pengamatan Daniel S. Lev, yang menjadi penggerak di balik usaha mengubah wewenang Pengadilan Agama adalah Ter Haar, para peminat ahli hukum adat dari Sekolah Tinggi Hukum (RHS) Jakarta (Batavia) dan van Vollenhoven di Leiden. Hoven dan Ter Haar menguasai politik hukum Belanda pada bagian pertama abad ke-20 dan berhasil meletakkan dasar pengembangan hukum adat serta menarik simpati orang Belanda yang tidak senang kepada Islam.

Kedua ahli hukum adat tersebut mengemukakan dalih bahwa dalam keyataannya, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan di Jawa dan bagian Indonesia yang lain. Hukum Islam mengenai waris, menurut mereka, sangat sedikit hubungannya dengan rasa keadilan hukum masyarakat Indonesia karena hukum Islam mengenai kewarisan bersifat individual, sedangkan hukum kewarisan adat bersifat komunal. Hukum Islam mengenai kewarisan belum sepenuhnya diterima hukum adat atau diterima adat Jawa. Wewenang untuk mengadili soal waris selama ini berada di Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, kemudian diserahkan kepada *Landraad* (pengadilan negeri) yang mengadili berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan perasaan keadilan hukum masyarakat setempat.

Secara argumentatif, Ter Haar mengajukan serangkaian pemikiran, mengapa kompetensi Pengadilan Agama perlu disederhanakan, yakni:

1. Adanya dualisme peradilan (terutama dalam masalah waris) akan memakan waktu dan biaya.
2. Hukum waris Islam berhubungan dengan kenyataan masyarakat Jawa dan belum menjadi hukum adat.
3. Peradilan agama berasal dari lingkungan raja-raja feodal.



4. Keputusan peradilan agama terasa asing dari cara waris-mewaris yang menjadi kesadaran rakyat.

Argumentasi tersebut kemudian mendapat tanggapan serius dari pemerintah kolonial Belanda untuk membatasi serta mengurangi kompetensi peradilan agama. Alasan inilah yang menyebabkan lahirnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 yang mengatur kompetensi peradilan agama dalam bidang-bidang berikut:

1. Perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam.
2. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim agama Islam.
3. Memberi putusan perceraian.
4. Perkara mahar (mas kawin), sudah termasuk *mut'ah*.
5. Perkara tentang keperluan kehidupan suami-istri yang wajib diadakan oleh suami.

Dengan diberlakukannya *Staatsblad* 1933 Nomor 74 terhadap penduduk pribumi yang beragama Nasrani, jelas teori *receptie* yang diberlakukan terhadap orang Islam dilaksanakan tidak adil dan konsekuensi sebab tidak dapat diketahui dengan pasti apakah hukum Nasrani itu sudah diterima dengan ikhlas dan menjadi hukum adat. Penggunaan teori *receptie* oleh pemerintah Belanda dengan mengenyampingkan hukum Islam dan memakai hukum adat bertujuan untuk melemahkan kedudukan hukum Islam. Tidak hanya di bidang hukum, dalam pendidikan Islam juga, menurut Army Vandenbosch, terjadi diskriminasi.

Usaha untuk meredusir berlakunya hukum Islam melalui wewenang Pengadilan Agama (*Staatsblad* 1937 No. 116) dipengaruhi oleh semakin kuatnya pendapat di kalangan politikus dan akademisi Belanda bahwa masalah perkawinan dan warisan adalah masalah negara. Prof. H.J. Nauta, misalnya, menulis dalam surat kabar *Nieuwe Rotterdamsche Courant* pada 27 Juli 1937 bahwa agama Islam boleh dianggap sebagai negara dalam negara (*staat in den staat*) karena dalam pandangan Barat, pengaturan hubungan



dimensi horizontal antara manusia, seperti perkawinan dan warisan, adalah masalah dan kewenangan negara, bukan agama.

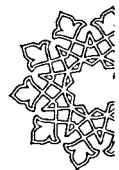
Faktor Utama Terbentuknya *Staatsblad* (1882-1937)

Pada mulanya, pemerintah Belanda tidak ingin mencampuri organisasi Pengadilan Agama. Tetapi, pada 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam *staatsblad* 1882 nomor 152 yang mengatur bahwa Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama yang dinamakan *priestrrad*. Menurut Notosusanto (1963: 6), penamaan tersebut sebenarnya keliru karena dalam agama Islam tidak dikenal pranata pendetaan atau *padre*. Kekeliruan itu dikecam oleh Snouck Hurgronje (1973: 21) yang menyatakan bahwa hal itu sebagai akibat kedangkalan pengetahuan pemerintah.

Kebijakan untuk tidak mencampuri urusan agama sebenarnya hanya persoalan tameng waktu yang strategis karena pemerintah Hindia Belanda belum berani mencampuri masalah Islam sehingga mereka belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai ini. Selain pertimbangan waktu, pemerintahan Belanda saat itu belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Keengganan untuk mencampuri masalah Islam tercermin dalam Undang-Undang Hindia Belanda ayat 119 RR yang berbunyi, "Setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama".

Pendapat Para Ahli Hukum

Pada saat itu, berkembang pendapat di kalangan ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam (*Mohammadansche Recht*) walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pandangan tersebut dikuatkan oleh Salomon Keyzer (1823-1868), Lodwijk Willem Charstian van den Berg (1845-1927), serta Carel Frederik Winter (1799-1859) yang menegaskan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang, jika orang itu beragama Islam, hukum Islam yang berlaku baginya.



Menindaklanjuti pendapat tersebut, pada 1884 Berg menulis asas-asas hukum Islam (*Mohammadansche Recht*) menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk memudahkan para pejabat pemerintah Hindia Belanda dalam merespons kepetingan hukum Islam masyarakat Jawa. Berselang delapan tahun (1892), terbit pula tulisannya mengenai hukum keluarga serta kewarisan Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan. Van den Berg menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia telah memeluk agama Islam. Walaupun dalam realitas pengamalannya sering terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ajaran pokok Islam. Dengan karya-karya tersebut, Berg mengupayakan agar hukum Islam dijalankan oleh hakim-hakim dari Belanda dengan bantuan penghulu atau *qadli-qadli* Islam.

Dikarenakan pendapat dan karyanya tersebut, Berg disebut sebagai penemu teori *receptio in complexu*. Walaupun demikian, Belanda merasa perlu memberlakukan hukum Barat (Belanda) untuk semua penduduk, termasuk golongan Bumiputra, yang terkenal dengan teori unifikasi hukum. Akan tetapi, kebijakan tersebut dianggap kurang strategis untuk menghentikan pemberlakuan hukum Islam. Unifikasi tersebut pun digagalkan oleh ahli hukum Belanda yang dipelopori Christian Snouck Hurgronje.

Menurut Snouck, lebih baik mencari jalan lain yang lebih halus daripada memaksakan hukum Barat (Belanda) karena akan semakin membangun kebencian warga Indonesia dan dinilai kurang efektif. Oleh sebab itu, langkah yang diambil bukan memaksakan hukum Belanda, melainkan membentuk opini serta memengaruhi dan mengacaukan *image* umat Islam terlebih dahulu dengan melahirkan teori *receptie* yang sengaja dihembuskan untuk mengacaukan sistem hukum yang telah ditaati masyarakat ketika itu, yakni hukum Islam.

The ultime goal mereka adalah agar antara adat, hukum Islam, dan hukum Barat terjadi benturan. Jika pergumulan terjadi, hukum Belanda yang telah didukung oleh kekuatan politik dan sarjana hukum didikan Belanda yang loyal terhadap produk hukum Belanda menjadi menguat. Sementara hukum Islam dengan sendirinya akan lemah. Usaha tersebut



ternyata efektif dan berhasil sehingga sampai sekarang pun hukum Islam berada dalam ketidakberuntungan.

Teori Hukum

Perbedaan pendapat di antara para tokoh hukum memunculkan teori-teori hukum yang ada di Indonesia, yaitu:

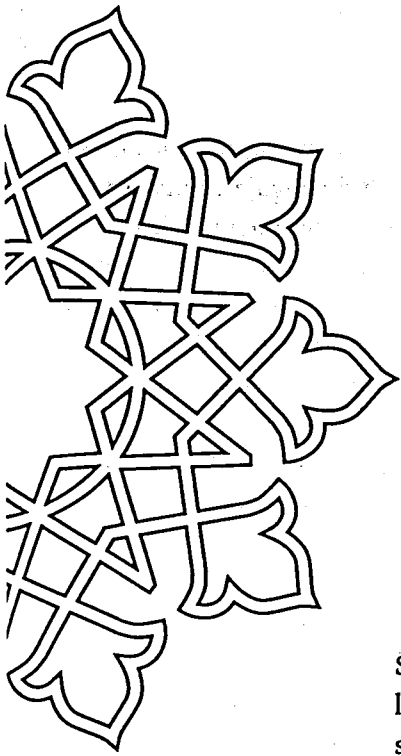
1. Teori *receptio in complexu*, yaitu teori yang menitikberatkan pada dasar pengikut suatu agama. Maksudnya bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam karena orang itu telah memeluk agama Islam. Teori ini dicetuskan oleh Van den Berg.
2. Teori unifikasi hukum, yaitu teori yang memperlakukan hukum Barat untuk semua golongan penduduk, baik Islam, Hindu, Kristen, maupun Buddha, serta golongan Bumiputra.
3. Teori hukum adat, bisa dikatakan bahwa hukum adat adalah suatu sistem yang *artificial*, buatan atau karangan, yang dipakaikan baju ilmiah, tujuannya jauh dari bidang hukum. Teori hukum adat diciptakan oleh van Vollenhoven.

Latihan

1. Jelaskan bagaimana peradilan agama pada masa penjajahan Belanda!
2. Jelaskan faktor utama terbentuknya *staatsblad* (1882-1937)!
3. Jelaskan dan sebutkan apa saja teori hukum!







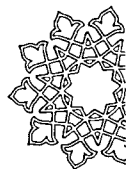
5

Peradilan pada Masa Penjajahan Jepang

Secara historis, keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun, pada waktu itu kewenangan sebagai hakim (*qadhi*) umumnya dilakukan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa. Khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut agama, sultan biasanya akan menunjuk seorang ulama untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Dasar yang digunakan untuk memutus perkara biasanya adalah Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab fikih karya para *fuqaha'*. Di samping itu, pemutusan perkara juga didasarkan pada hukum adat sebagai *living law* yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istilah yang digunakan sebagai hukum dalam Islam disebut *'urf*.

Setelah Belanda pergi dan digantikan oleh Jepang, sistem yang dipakai dalam menjalankan



pemerintahan pun tidak jauh berbeda. Bahkan tak jarang bertentangan dengan peradilan dalam negeri karena memang disengaja dibuat sedemikian rupa agar tidak jelas. Sebab sejak semula pemerintah kolonial memang sangat khawatir dengan diterapkannya hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam sangat bertentangan dengan ideologi dan agama penjajah. Bagi penjajah, memberikan hak hidup terhadap hukum Islam sama saja memberikan hak hidup bagi hukum bangsa Indonesia.

Setelah Jenderal Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang pada 8 Maret 1942, pemerintah Jepang segera mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru tersebut tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam, sebagaimana kondisi terakhirnya pada masa pendudukan Belanda.¹

Peradilan agama pada masa pendudukan Jepang tidak dapat dilepaskan dari "kebijakan-kebijakan" pemerintah Belanda. Daniel S. Lev mengatakan bahwa pendudukan Jepang hanya membawa kemajuan dan memperkuat kedudukan Pengadilan Agama yang ada di satu atau dua daerah di luar Jawa saja, itu pun setelah Jepang melihat keuntungan yang akan diraih (Lev, 1972: 33). Sedangkan Anderson menyatakan bahwa pengelolaan negara jajahan, baik yang dilakukan Jepang maupun Belanda, tidak ada bedanya.²

Menurut Bustanul Arifin, pelembagaan peradilan agama di Indonesia adalah berdasarkan keputusan raja No. 24, 19 Januari 1882 yang diundangkan dalam *Staatsblad* (Stb) 1882 No. 152 merupakan akhir intervensi politik terhadap hukum Islam karena membahayakan praktik hukum kolonial Belanda yang sangat jelas bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Belanda memang tidak netral terhadap urusan agama, terutama terhadap Islam. Hal tersebut bisa dipahami dari kombinasi kontradiktif Belanda, di mana pada satu sisi Belanda sangat takut terhadap

1 <http://duniaku-miftahulkhoiri.blogspot.com/2011/03/hukum-islam-pada-masa-pendudukan-jepang.html>

2 Kamsi, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, 2008, hlm. 157.



ancaman pemberontakan kaum Islam fanatik fundamentalis, dan adanya harapan yang sangat berlebihan, di mana Belanda sangat optimistik akan keberhasilan upaya Kristenisasi yang diharapkan akan segera menyelesaikan persoalan yang ada.

Semenara itu, pada lain sisi, menurut Lev (1972: 28), pelembagaan peradilan bisa dikatakan merupakan sebuah simbol dari kekuasaan hukum Islam—meskipun rapuh—di mana golongan ningrat telah lama berusaha untuk menghapusnya. Di lain pihak, Belanda menganggap bahwa pelembagaan peradilan agama merupakan “jasa baik” untuk meluruskan praktik “peradilan” yang saat itu berjalan untuk memelihara stabilitas kekuasaan politik Belanda.

Sebelum adanya Stb. No. 152, praktik peradilan berjalan dalam bentuk dan wadah yang sangat sederhana atau tradisional. Persidangan dilaksanakan menurut keperluan warga setempat. Pelaksananya juga hanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap mengerti tentang ilmu-ilmu agama. Ini berarti bahwa pada saat itu, untuk menjadi hakim yang dilegitimasi oleh warga, hanya diperlukan keahlian di bidang keagamaan. Pengangkatannya pun tidak memerlukan prosedur administratif dan datang dari atasan. Konsekuensi negatifnya adalah timbul ketidakpuasan dalam menerima putusan yang kemudian berlanjut dengan sengketa atau bahkan mengabaikan keputusan hakim.

Peradilan agama dengan evolusinya merupakan implementasi politik semenjak dikeluarkannya Stb. No. 152, sampai proses diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Para pejabat peradilan agama pada saat itu tidak lebih dari “*beamte*”, yakni petugas yang dibebani tugas-tugas yang bentuknya kurang jelas, tetapi mempunyai kedudukan yang terhormat dalam pertanggungjawabannya, di samping karena kurang terdidik dan terlatihnya mereka dalam penanganan peradilan agama.

Peradilan agama, sampai Jepang hengkang, sejak adanya reorganisasi dengan Stb. No. 152 tidak berubah secara organisatoris. Ia tidak berdiri sejajar dengan peradilan umum (negeri). Putusan peradilan agama tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya persetujuan eksekusi dari badan peradilan umum.



Pada 1922, dibentuk badan yang bertugas mencari jalan agar peradilan agama menjadi lebih baik menurut pandangannya. Komisi tersebut berhasil membuat beberapa kesimpulan penting, meliputi kasus-kasus yang dimasukkan ke peradilan agama hanya kasus yang dianggap erat kaitannya dengan hukum Islam serta kasus-kasus yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan, perceraian, mahar, dan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya

Peradilan agama yang sebelumnya terdiri atas ketua dan anggota-anggota yang punya hak suara, berubah menjadi hanya seorang hakim saja. Hal ini berkenaan dengan kekuasaan *qadhi*. Hakim harus dibantu oleh dua orang penasihat yang ahli dalam hukum Islam. Untuk menghindari hal-hal yang kurang adil dan meninggikan peradilan agama, hakim harus menerima gaji dari bendahara negara.

Pengadilan banding (Mahkamah Tinggi Islam/*Hor Voor Islamietische Zaken*) ditetapkan kembali untuk menangani kasus-kasus dari peradilan agama (Lev, 1972: 19).

Pada 1937, akhirnya dibuatlah sebuah peraturan baru (Stb. 1937 No. 116) dengan mencantumkan pasal-pasal yurisdiksinya. Saat itu ditetapkan pula Mahkamah Tinggi Islam dan pemindahan wewenang mengadili perkara waris kepada pengadilan negeri (pasal 7 S. 1937 No. 116 dan 610), serta diberlakukannya ordonansi perkawinan dengan pencatatan perkawinan di catatan sipil. Kerapatan *qadhi* besar berlaku untuk daerah Kalimantan Selatan (pasal 19 Stb. 1937 No. 639 dan 63). Sedangkan bagi daerah di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, masalah peradilan agama diserahkan kepada penguasa dan masyarakat setempat yang merupakan bagian dari pengadilan adat dan sultan.³

Kebijakan Jepang terhadap Peradilan Agama

Dari Maret 1942 sampai Agustus 1945, bekas jajahan Hindia Belanda hidup di bawah penguasaan Jepang. Meski dengan waktu yang sangat singkat, sejarah mencatat bahwa penguasaan Jepang merupakan masa-masa

3 Ibid, hlm. 161



traumatik yang secara mendasar memengaruhi banyak aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Disadari atau tidak, pada tahap-tahap akhir penjajahan—ketika kekuatan militer semakin memburuk—politik Jepang perlahan memberikan konsesi-konsesi yang lebih besar kepada Indonesia. Jepang tampaknya membentuk politik kolonial yang luwes, terutama dengan pertimbangan-pertimbangan dan strategi jangka pendek. Para pimpinan Islam pada saat itu melihat adanya kesempatan memperoleh hak-hak yang pernah hilang sejak 1920-1930-an, bahkan mungkin lebih dari itu.

Jepang secara mengejutkan dapat membuktikan pemahamannya yang baik terhadap posisi dan pengaruh kelompok-kelompok elite yang saling bersaing satu sama lain, dan dengan sangat mahir memanipulasi kelompok-kelompok tersebut demi kepentingannya.

Dengan demikian, pada dasarnya, dalam kaitannya dengan peradilan agama, tidak ada yang cukup berarti sampai dibentuknya Departemen Agama, kini bernama Kementerian Agama, pada 3 Januari 1946 sebagai bukti bahwa Indonesia bukanlah negara Islam dan bentuk dari kompromi antara kalangan priayi nasionalis di satu pihak dan Islam nasionalis di pihak lain.

Puncak pertentangan tampak semakin jelas ketika proses pembentukan dasar negara Republik Indonesia. Pertentangan-pertentangan semacam ini, selain memang telah ada sebelum Jepang datang, merupakan hasil maksimal dari proses *divide et impera* yang dilakukan Jepang untuk memperkuat kedudukannya, walaupun akhirnya Jepang harus merelakan sistem *chek and balance* berakhir akibat tumbuhnya rasa kebangsaan Indonesia dan pemberian fasilitas yang berbeda terhadap golongan elite Indonesia.

Partai Masyumi yang berdiri pada November 1943, diminta untuk menarik diri dari jenis politik apa pun. Dalam hal ini ada tiga alasan: *Pertama*, orang Jepang meningkatkan perwakilan Islam di dalam organ-organ politik yang didirikannya. *Kedua*, tugas-tugas yang diberikan kepada organisasi baru, terutama yang diberikan kepercayaan secara pribadi kepada anggota-anggota, ribuan kiai dan ulama, di tingkat desa sampai batas-batas yang jauh,



merupakan usaha politik *par excellence*. Dalam kenyataannya, Jepang menjamin kekuatan muslim yang tak ada taranya dan berlangsung lama di arena politik Indonesia. *Ketiga*, Masyumi diberikan tempat utama dalam mekanisme pusat *Djawa Hokokai* (himpunan kebaktian rakyat atau organisasi pelayanan rakyat di Jawa) tanpa kehilangan kebebasan organisasinya. Oleh karena itu, ketua Masyumi, Hasyim 'Asyari dan Ir. Soekarno, diangkat sebagai penasihat utama (*komon*) bagi *genseikan* (kepala pemerintahan militer) yang mempelajari *hokokai*. Sedangkan Mas Mansur dan Moehammad Hatta bertanggung jawab terhadap masalah dalam negeri umum di pusat. Dengan kata lain, Masyumi menjadi bagian dari pemerintahan Jepang (Benda, 1980: 185).

Perkembangan-perkembangan selanjutnya, sepanjang berkaitan dengan Islam, tampaknya menjadi isu sentral sampai menjelang deklarasi yang penuh dengan kisah. Di samping semakin tajamnya pertentangan politik dan proses pemenuhan "janji-janji" yang diberikan Jepang, tampaknya dipenuhi masalah krusial, yaitu pertentangan politik antar-golongan elite Indonesia yang masing-masing merasa berhak untuk memutuskan (Benda, 1980: 185).⁴

Badan-Badan Peradilan pada Masa Penjajahan Jepang

Hukum yang berlaku pada masa pendudukan Jepang tidak berubah. Peraturan *Osamu Sirei* (UU Balatentara Jepang) No. 1 Tahun 1942 pasal 3 menyatakan:

"Segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer" (saat itu, politik hukum kembali merujuk pada pasal 131 dan pasal 163 IS).

Pemerintah Jepang melakukan perubahan atas badan-badan peradilan, antara lain dihapuskannya dualisme dalam tata peradilan sehingga badan-badan peradilan yang ada diperuntukkan semua golongan. Badan-badan peradilan pada masa penjajahan Jepang, di antaranya:

4 <http://suciyani.blogspot.com/2011/02/family-law.html>.



1. *Hooggerechtshof* sebagai pengadilan tertinggi berubah menjadi *Saiko Hoin*.
2. *Raad van Justitie* berubah menjadi *Koto Hoin*.
3. *Landraad* berubah menjadi *Tiho Hoin*.
4. *Landgerecht* berubah menjadi *Keizai Hoin*.
5. *Regentschapsgerecht* berubah menjadi *Ken Hoin*.
6. *Districtsgerecht* berubah menjadi *Gun Hoin*.⁵

Pada dasarnya, baik secara historis maupun administratif, kebijakan politik peninggalan pemerintah kolonial Jepang memberikan implikasi yang berarti. Walaupun demikian, jika dipandang dari kaca mata perubahan sosial-keagamaan, akan terlihat kemajuan mencolok untuk umat Islam dibandingkan pada zaman Belanda. Jepang tidak ragu-ragu meningkatkan posisi agama Islam dan memberikan prestise sosial serta secara implisit memberikan prestise politik kepada juru bicaranya di Jawa dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Perhatiannya yang intensif dan dukungannya terhadap Islam merupakan perbedaan utama praktik-praktik politik Jepang dan Belanda. Dua perbedaan lainnya adalah; *pertama*, korps priayi yang menjadi penguasa administratif dengan sekian banyak hak istimewa pada masa Belanda menjadi berkurang pada masa pendudukan Jepang. *Kedua*, berkaitan dengan pemimpin gerakan nasionalis Indonesia. Sesudah bertahun-tahun pembuangan para pemimpin yang terkemuka, elite nasionalis "sekuler" yang berpendidikan Barat telah diakui secara resmi oleh pemerintah Jepang, kemudian diangkat ke pos-pos pemerintahan militer dan memperoleh prestise sosial (Benda, 1980: 185).

Latihan

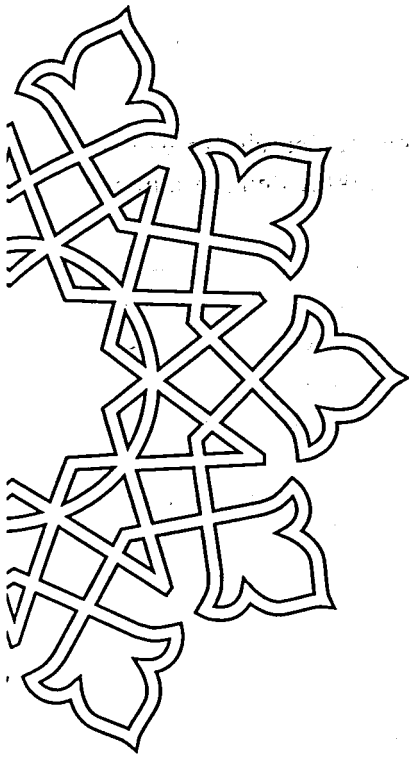
1. Jelaskan konsep kebijakan Jepang dalam menangani peradilan Islam di Indonesia!
2. Jelaskan beberapa institusi peradilan pada masa penjajahan Jepang!



5 <http://fauzirijal.wordpress.com/2013/01/13/sejarah-lembaga-peradilan-di-indonesia/>







6

Peradilan Islam pada Masa Kemerdekaan

Seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis menegakkan perang yang kemudian membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Dalam hal ini, tampaknya Jepang lebih memercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara, seperti dewan penasihat *Sanyo Kaigi* dan BPUPKI (*dokuritsu zyunbi tyoosakai*), kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, dari 62 orang anggota komite tersebut, hanya 11 orang yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah Ramli menyatakan bahwa BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan tersebut cukup representatif



mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia.¹ Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya Piagam Jakarta.

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Sejak agama Islam dianut oleh penduduk Indonesia, hukum Islam pun mulai diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Perkembangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang berusaha menghambat berlakunya hukum Islam dengan berbagai cara.

Hukum Islam bukan satu-satunya sistem hukum yang berlaku, tetapi terdapat sistem hukum lain, yaitu hukum adat dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling memengaruhi dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam mulai diperhitungkan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku.

Pada masa berikutnya, hukum Islam mulai mewarnai hukum nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik yang berlaku nasional maupun khusus bagi umat Islam. Gejala mutakhir perkembangan hukum Islam adalah munculnya gerakan otonomisasi hukum Islam di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya aturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penerapan hukum Islam.

Periode Awal Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai bangkit dan berangsur-angsur menghilangkan politik hukum pemerintah kolonial Belanda, yang sudah barang tentu sangat merugikan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Sejalan dengan itu, Departemen Agama merupakan bentuk lain dari jabatan agama yang sudah ada pada masa kesultanan Islam, ditempatkan sebagai bagian dari pemerintahan.

¹ Ramli Hutabarat, *Kedudukan Islam dan Kontitusi-Kontitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, 2005, hlm. 85.



Legislasi pembentukannya diatur melalui Penempatan Nomor 1 tertanggal 3 Januari 1946.

Dengan terbentuknya Departemen Agama, terjadi pula pergeseran kebijakan. Institusi Mahkamah Islam tinggi ditarik dari lingkungan Departemen Kehakiman dan selanjutnya dilimpahkan ke Departemen Agama. Hal itu diatur melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5-Sd tanggal 25 Maret 1946, yang berbunyi: "Pada masa kolonial Belanda tidak ada pegawai Pengadilan Agama yang mendapat gaji tetap atau honorium dari pemerintah, ketua pengadilan penghulu atau kepala yang dibayar oleh pemerintah Hindia Belanda bukan sebagai ketua Pengadilan Agama, akan tetapi dalam kedudukannya sebagai *Islamitisch adviseur* pada *landraad*. Adapun setelah kemerdekaan, anggaran pembelanjaan peradilan agama disediakan oleh pemerintah".²

Akan tetapi, pada lain sisi, dalam penempatan peradilan agama terdapat kebijakan yang berbeda. Melalui UU No. 19 Tahun 1948, peradilan agama pernah dicoba untuk ditempatkan dalam peradilan umum secara istimewa. Hal tersebut secara jelas termaktub dalam UU No. 19 Tahun 1948 yang berbunyi: "...Perkara perdata yang menurut hukum yang hidup harus diputus menurut hukum agama Islam, yang menurut hukum yang hidup harus diputus oleh badan Peradilan Umum dalam semua tingkat peradilan (Peradilan Negeri, Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung), terdiri atas seorang hakim yang beragama Islam dan 2 orang hakim ahli agama Islam".

UU No. 19 Tahun 1948 yang belum sempat dinyatakan berlaku, menghendaki dihapusnya susunan peradilan agama yang sudah ada dan dimasukkan ke pengadilan agar keputusannya tidak menyimpang (bias) dari ketentuan syariat Islam. Beruntung undang-undang itu pun "layu sebelum berkembang", bahkan dapat dikatakan "mati sebelum terlahir" karena sampai lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1961 yang mengatur tentang tindakan Pengadilan Sipil, UU No. 19 Tahun 1948 belum sempat diberlakukan.

2 Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Ghalia Indonesia, 2011.



Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD sementara dan pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Luar Jawa-Madura. Menurut ketentuan pasal 1, "Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Sedangkan menurut ketentuan pasal 11, "Apabila tidak ada ketentuan lain, di ibu kota provinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih, daerah, provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama".³

Secara resmi, ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1957 yang dikeluarkan pada 5 Oktober 1957. Tampaknya di dalam PP No. 45 Tahun 1957 itu masih tersimpan semangat "*receptive theoris*" yang justru sangat merugikan kepentingan umat Islam. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1957 yang berbunyi: "Peradilan Agama Islam memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut 'hukum yang hidup' diputus menurut agama Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, *nafkah*, *maskawin*..."

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa Pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan Ketetapan Pemerintah Nomor 5, 25 Maret 1946. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi perubahan dalam pemerintahan, tetapi tidak tampak perubahan yang sangat menonjol dalam tata peradilan, khususnya peradilan Agama di Indonesia. Hal tersebut disebabkan bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali akan menjajah. Namun, pada aspek jasa terdapat sebuah perubahan, yaitu sebelum merdeka, pegawai Pengadilan Agama dan hakim tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah; setelah merdeka, anggaran belanja Pengadilan Agama disediakan pemerintah.

3 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003.



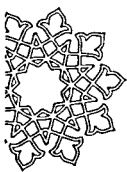
7

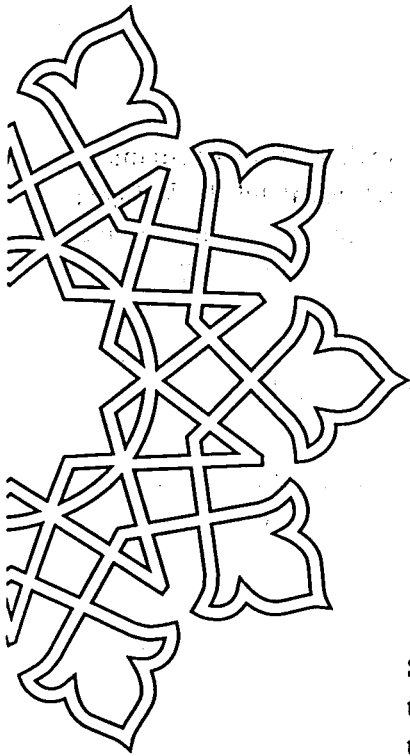
Segera setelah melalui perdebatan yang sengit dan panjang, akhirnya pascakemerdekaan ditetapkan dasar negara Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berlandaskan asas negara Islam. Hal itu menyebabkan terjadi perubahan dalam pemerintahan (umum), tetapi tidak membawa perubahan yang menonjol dalam tata peradilan Islam.

Latihan

1. Jelaskan bagaimana peradilan Islam pada masa kemerdekaan!
2. Bagaimana pengaruh peradilan agama terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia?







7 **Peradilan pada Masa Orde Lama**

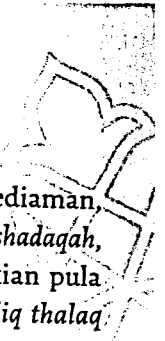
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan dalam pemerintahan, tetapi tidak terjadi perubahan yang menonjol dalam peradilan agama. Hal tersebut disebabkan bangsa Indonesia dihadapkan revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang akan menjajah. Di samping itu, konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan negara memungkinkan penundaan perubahan tersebut.

Selanjutnya, pada 1957, pemerintah mengeluarkan PP No. 45 tentang Pembentukan Peradilan Agama. Ketentuan pasal 4 PP tersebut berisi mengenai:¹

1. Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam yang berkenaan

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya), 2000, hlm. 123.





dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, *nafaqah*, mahar, tempat kediaman *mut'ah* dan sebagainya, *hadhanah*, perkara waris, wakaf, hibah, *shadaqah*, *baitulmal*, dan lainnya yang berhubungan dengan itu, demikian pula memutuskan perceraian dan menegaskan bahwa syarat *ta'liq thalaq* sudah berlaku.

2. Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum agama Islam.

Akan tetapi, tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis, sementara kaum muslim pada era ini tertutup untuk memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili umat Islam kala itu dibubarkan pada 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.²

Dalam tatanan hukum di Indonesia pascakemerdekaan, keberadaan peradilan agama mulai diakui eksistensi dan peranannya. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1961 yang mengatur tentang tindakan sipil. Sementara itu, untuk memenuhi kehendak masyarakat Aceh, dalam rangka meredakan suasana keamanan dan ketertiban, dibentuk Mahkamah *Syar'iah* yang tertuang dalam PP No. 29 Tahun 1957. Kebijakan politik pemerintah membentuk Mahkamah *Syar'iah* untuk wilayah Aceh dianggap sangat penting dalam mengantisipasi berbagai persoalan umat Islam di wilayah hukum lainnya. Untuk itu, jangkauan wilayah hukum Mahkamah *Syar'iah* diperluas mengikuti wilayah hukum luar Jawa dan Madura serta di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Secara resmi, ketentuan itu diatur dalam PP No. 45 Tahun 1957 yang dikeluarkan pada 5 Oktober 1957. Tampaknya, di dalam PP No. 45 Tahun 1957 masih tersimpan semangat "*receptie theori*" yang justru sangat merugikan kepentingan umat Islam. Hal tersebut terlihat pada

2 Bakhtiar Efendi, *Islam dan Negara*, (Jakarta: pramadina), 1998, hlm. 111-112.



pasal 4 ayat 2 PP No 45 Tahun 1957 yang berbunyi: "Pengadilan Agama Islam memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut 'hukum yang hidup' diputus menurut agama Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, *nafkah*, *maskawin*..."

Dengan demikian, dapat-tidaknya Pengadilan Agama Islam menyelesaikan perkara umat Islam, bergantung pada diterima-tidaknya hukum Islam sebagai hukum oleh adat setempat. Di samping itu, dengan lahirnya PP No. 45 Tahun 1957 berarti peradilan agama di Indonesia memiliki nama dan berbagai peraturan yang beragam. Sudah tentu hal itu berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan peran peradilan agama itu sendiri. Dengan beragam aturan tersebut, beragam pula kekuasaan dan wewenangnya sehingga putusan Pengadilan Agama sering dikenal disparitas.³

Undang-Undang yang Lahir dan Berkaitan dengan Peradilan Agama pada Masa Orde Lama

Dua belas tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia (1945-1957), ada tujuh hal yang dapat diungkapkan yang berkaitan langsung dengan keberadaan peradilan agama di Indonesia.

1. Penyerahan pembinaan kepada Departemen Agama
Setelah Indonesia merdeka, atas *ushul* Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama melalui Penetapan Pemerintah No. 5 tertanggal 25 Maret 1946.

Peraturan sementara yang mengatur tentang peradilan agama tercantum dalam *verordering* 8 November 1946 dari CCOAMACAB (*Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch*) untuk Jawa dan Madura.

Dengan *verordering* tersebut, ditetapkan adanya Pengadilan Hulu (*Penghoeloe Gerecht*) yang terdiri atas seorang ahli hukum Islam sebagai

3 Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor; Gahalia Indonesia), 2011. hlm. 142.



ketua yang dibantu oleh 2 orang anggota dan seorang panitera, sedangkan kekuasaannya adalah sama dengan "*priesterrad*" dahulu, seperti yang tercantum pada pasal 2a ayat (1) dari KB. 1882 S. 152 yang kemudian diubah menjadi S. 1973 No. 116 pelaksanaan (*executoirverklaring*) dari putusan *Penghoeloe Gerecht* dilakukan oleh hakim sehari-hari, yaitu *Landgerecht* gaya baru.

2. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak, dan rujuk dari Pengadilan Agama. Penghulu kepala yang tadinya merangkap Ketua Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan. Oleh sebab itu, terbentuklah penghulu kabupaten yang diserahkan urusan kepenghuluan di samping Penghulu Hakim yang dikhususkan menangani Pengadilan Agama saja dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala.

Untuk mencapai kesatuan dalam hukum, pada akhir 1947, pemerintah Indonesia menghapus pengadilan yang selama ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, sebelum itu, bagi keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta, dalam urusan agama diadakan pengadilan tersendiri. Untuk urusan Agama Islam diadakan pengadilan (*raad*) serambi dan untuk banding ada *pradoto gede*. Dengan penghapusan kedua pengadilan itu, sejak akhir 1947, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi keluarga keraton.

3. Lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1948

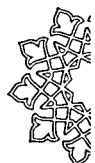
Pada 1948, lahir Undang-Undang No. 19 tentang Susunan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa, yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), pasal 75, dan pasal 33. Undang-undang ini merupakan peraturan yang penting tentang peradilan pada masa pemerintahan Indonesia di Yogyakarta.



Undang-undang ini bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi undang-undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada 3 Maret 1947.

Sehubungan dengan lingkungan peradilan, undang-undang ini menetapkan 3 (tiga) lingkungan peradilan, yaitu:

- a. Peradilan umum.
 - b. Peradilan tata usaha negara.
 - c. Peradilan ketentaraan.
4. Masa Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Tahun 1950
Republik Indonesia Serikat, yang sering disingkat dengan "RIS", adalah masa yang tidak panjang, yakni sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Menurut Pasal 197 ayat (1), konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku saat pemulihan kedaulatan.
 5. Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat sangat singkat, yakni hanya sekitar tujuh bulan 21 hari, mulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada waktu itu, rakyat Indonesia dari daerah-daerah bagian seluruh Indonesia menghendaki terbentuknya susunan republik kesatuan. Daerah-daerah serta negara-negara bagian dari daerah lainnya dibubarkan dan bergabung dengan Republik Indonesia pada 9 Maret hingga 18 April 1950. Pada 17 Agustus 1950, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1950 (LN No. 56), di mana Konstitusi RIS diganti menjadi UUD sementara sehingga lahirlah Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan.
 6. Lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951
Pada 1951, di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan sipil yang berhubungan dengan peradilan. Dalam undang-undang tersebut terdapat empat hal penting, yaitu:



- a. Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan suasana negara kesatuan.
 - b. Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua pengadilan adat.
 - c. Pelanjutan peradilan agama dan peradilan desa.
 - d. Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan *lardgrecht* atau pengadilan negeri serta pembentukan pengadilan tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan pengadilan tinggi Yogyakarta serta Bukit Tinggi ke Surabaya dan Medan.
7. Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954
- Dikarenakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, untuk luar Jawa dan Madura masih berlaku *Huwerijksordonantie Buitengewesten* 1932 No. 4 Tahun 1982 serta peraturan tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang berlaku di daerah-daerah swapraja serta peraturan-peraturan lainnya. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dirasa perlu adanya satu macam undang-undang yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Pada 2 Oktober 1954, ditetapkan berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh luar Jawa dan Madura.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 peraturan perundangan yang lahir dalam kurun tahun 1945-1947 yang berkaitan dengan peradilan, pencatatan nikah, talak, dan rujuk, yaitu:

1. Peraturan pemerintah No. V tertanggal 25 Maret 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi bagian Kementerian Kehakiman dipindahkan ke Kementerian Agama.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 untuk Jawa dan Madura.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
4. Lahirnya konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949; yang pokok di sini adanya peradilan federal dan daerah bagian.



5. Lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan acara pengadilan sipil yang berhubungan dengan peradilan.
6. Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1945 pada 26 Oktober 1945 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa serta Madura.

Peraturan Pemerintah yang Berkaitan dengan Peradilan Islam pada Masa Orde Lama

Peradilan Islam pada Masa Orde Lama tidak terlepas dari tiga hal yang perlu diangkat ke permukaan; *pertama*, lahirnya PP No. 29 tahun 1957; *kedua*, PP No. 45 tahun 1957; *ketiga*, UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan.

1. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957
Dengan adanya PP No. 29 Tahun 1957, di Aceh dibentuk sebuah Mahkamah *Syar'iah* yang mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam. Kemudian, dengan dihapusnya Provinsi Aceh karena berdirinya NKRI pada 15 Agustus 1950, kehadiran Mahkamah *Syar'iah* tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, lahirlah PP No. 29 Tahun 1957. Dengan keluarnya PP tersebut, keadaan dasar hukum Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura sangat beragam. Karena keadaan tersebut, untuk daerah luar Jawa-Madura (kecuali sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) diberlakukan PP No. 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama (*masya*) yang isinya sama dengan PP No. 27 Tahun 1957.

Menurut PP No. 29 Tahun 1957, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara:

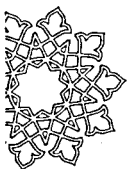
- a. Perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam.
- b. Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, dan rujuk, *fasakh*, serta *hadhanah*.



- c. Perkara waris, wakaf, hibah, sedekah, *baitulmal*, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.
- d. Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa talak sudah berlaku. Dengan keluarnya PP No. 29 Tahun 1957, dasar hukum peradilan agama di luar Jawa dan Madura sangat beragam, antara lain:
 - a. Di Aceh berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957.
 - b. Di bekas Negara Sumatera Timur yang disebut Majelis Agama tanggal 1 Agustus 1950 No. 350 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953.
 - d. Di Palembang berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 15 Tahun 1952.

Dikarenakan keadaan tersebut, ditambah dengan penampungan banyak penjabat badan Peradilan Agama dalam formasi kantor urusan Agama sebagai akibat pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, seolah-olah badan peradilan agama terhapus sehingga perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan tidak mendapat perhatian atau pelayanan semestinya. Untuk melaksanakan pasal 1 ayat (4) UU darurat No. 1 Tahun 1951, untuk daerah Jawa dan Madura (kecuali sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur yang termasuk dalam daerah hukum dari pengadilan *qadi*) diadakan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 (LN. No. 99) yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iah) yang isinya sama dengan Peraturan Pemerintahan No. 27 Tahun 1957. Oleh karena itu, PP No. 29 Tahun 1957 dicabut oleh PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan PA/Masya di luar Jawa dan Madura.

- 2. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura, wewenang Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, meliputi:
 - a. Nikah.
 - b. Talak.



- c. Rujuk.
- d. *Fasakh*.
- e. Nafkah.
- f. Maskawin (mahar).
- g. Tempat kediaman (*maskan*).
- h. *Mut'ah*.
- i. *Hadhanah*.
- j. Perkara waris-mewaris.
- k. Wakaf.
- l. Hibah
- m. Sedekah.
- n. *Baitul Mal*.

Peraturan Pemerintah ini berisi 13 pasal, pada pasal 12 dinyatakan bahwa pelaksanaan dari peraturan tersebut diatur oleh Menteri Agama.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dengan memerhatikan surat penetapan Menteri Kehakiman pada 27 Mei 1957 No. J.P.18/7/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, pada 13 November 1957 Menteri Agama menetapkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* di Sumatera.

Dalam penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* Provinsi. Mahkamah *Syar'iah* Provinsi di Kuta Raja mempunyai daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Provinsi Aceh yang terdiri atas 16 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah*. Mahkamah *Syar'iah* Provinsi di Medan meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 11 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah*. Mahkamah *Syar'iah* Provinsi di Bukit Tinggi mempunyai daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Riau yang terdiri atas 20 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah*. Mahkamah *Syar'iah* Provinsi Palembang mempunyai daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri



atas 7 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah*. Penetapan Menteri Agama berlaku mulai 1 Desember 1957.

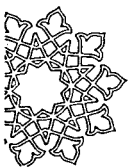
Dengan dasar hukum yang sama dalam Penetapan Menteri Agama No. 57 Tahun 1957, pada 6 Maret 1958 Menteri Agama membuat Penetapan Menteri Agama No. 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* di Kalimantan.

Dalam penetapan tersebut dibentuk 6 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* dan 1 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* provinsi yang bertempat di Banjarmasin. Pada tanggal yang sama, ditetapkan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Dalam penetapan tersebut dibentuk 34 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* dan 1 Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* Provinsi di Makassar.

Dalam rangka memperlancar jalannya Pengadilan Agama di daerah-daerah, Menteri Agama membentuk cabang-cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah*. Berdasarkan penetapan Menteri Agama pada 11 Juli 1959, dibuka cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* di Tanjung Karang untuk daerah Lampung Utara di Kota Bumi.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 pada 14 November 1960 dibentuk 16 cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.

Pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama di Jawa-Madura dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961. Dalam keputusan tersebut dibentuk 7 cabang kantor Pengadilan Agama. Pembentukan cabang kantor di Sumatera ditambah lagi pada 1961. Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 62, dibentuk dua cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* di Aceh dan Sumatera. Pengadilan Ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku menuntut penambahan Pengadilan Agama. Atas dasar kebutuhan



tersebut, melalui keputusan Menteri Agama No. 87 Tahun 1966 ditetapkan penambahan 15 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tingkat dua di daerah Sulawesi dan Maluku.

Di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 4 Tahun 1967, diadakan perubahan kantor-kantor cabang menjadi 4 kantor cabang. Melalui keputusan Menteri Agama No. 28 Tahun 1967 dibentuk kantor cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi. Sejalan dengan perkembangan ketataprajaan di daerah Kalimantan Selatan dan berdasarkan historis yuridis, sebagaimana diatur dalam stbl. 1937 No. 638 dan 639 di daerah-daerah tersebut Kerapatan Kadi yang kemudian pada 1962 dihapus, berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1967 dibentuk kembali 4 kantor Kerapatan Kadi yang di daerah hukumnya adalah sama dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri setempat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat yang berperkara di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, dan Sumatera, dengan keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968, di Kalimantan Tengah dibentuk 3 Pengadilan Agama, di Kalimantan Timur 2 Pengadilan Agama, di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung 3 Pengadilan Agama, serta Nusa Tenggara Barat 4 Pengadilan Agama.

3. Lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, pada 1964 keluarlah Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 10 peraturan pemerintah No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkup peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

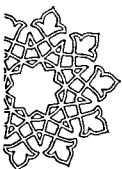


Kekuasaan Kehakiman pada Masa Orde Lama

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan landasan bagi terbentuknya sistem hukum baru, yaitu sistem hukum Indonesia. Dengan sistem hukum baru, bangsa Indonesia bertekad untuk mengganti seluruh sistem hukum kolonial dengan sistem hukum nasional Indonesia. Politik hukum baru yang berisi pembaruan menjadi keharusan sejak Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi dan di setiap perubahan tersebut dirumuskan pula pasal baru yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari fakta perubahan pasal dan bagian kekuasaan kehakiman antara yang dirumuskan di dalam UUD Tahun 1945 sebelum amandemen dan pascaamandemen.

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, suatu negara dikatakan sebagai negara hukum bila mempunyai ciri-ciri, antara lain adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum. Berkaitan dengan kebebasan kekuasaan kehakiman, tampaknya doktrin konstitusional tersebut, dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia, selalu mengalami pasang surut, bergantung pada kondisi sosial politik yang merupakan super sistem yang melingkupi sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) serta Pasal 25, kemudian mengalami perubahan setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada 9 November 2001 oleh MPR. Menurut UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain, seperti pemerintah maupun



badan lain selain pemerintah. Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kehakiman dapat bebas dan tidak memihak, antara lain:

1. Landasan yuridis tentang Mahkamah Agung.
2. Kualitas dan integritas para hakim.
3. Tradisi kehidupan hukum dalam masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dari awal Orde Baru sampai akhir Orde Lama, beberapa kebijakan pembentukan Undang-Undang Pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman telah dibuat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965.

Undang-undang tersebut diciptakan untuk memenuhi perintah pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan asas kebebasan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan:

1. Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-Undang.
2. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 sama sekali tidak mengakui adanya kebebasan kekuasaan kehakiman. Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan hal tersebut adalah:

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kemerdekaan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.
2. Penjelasan pasal 19 tersebut, antara lain berbunyi: "Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan



membuat undang-undang... bahwa presiden/pemimpin besar revolusi harus dapat turun atau campur tangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana”.

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang mewajibkan hakim untuk memihak pada kebenaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan Manipol Usdek. Salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan presiden sebagai pemimpin besar revolusi yang memiliki kedudukan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk kekuasaan kehakiman. Pengingkaran terhadap asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri oleh kedua undang-undang tersebut merupakan penyimpangan terhadap jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan ketentuan penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbahaya bagi kelangsungan pembangunan negara hukum Indonesia. Oleh sebab itu, ketika pemerintah Orde Baru tampil menggantikan Orde Lama, muncul arus pemikiran tentang pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu agendanya adalah mengganti kedua undang-undang tersebut dengan undang-undang yang baru yang mengatur kembali kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, seperti pernah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948.

Proses terbentuknya UU No. 14 Tahun 1970 diawali dengan perdebatan yang berarti dan berkepanjangan. Persoalan pokok bagi beberapa kelompok adalah penegakan hukum di negara Indonesia. Titik tolak perdebatan itu meluas dengan tuntutan agar UU No. 19 tahun 1964 dicabut. UU No 19. Tahun 1964 merupakan penyempurnaan patrimonialisme formal. Demokrasi dipimpin membungkam para hakim, advokat, dan para intelektual dengan ketentuan pasal 19 bahwa: “Presiden boleh campur tangan dengan leluasa dalam tiap tahap proses peradilan demi kelangsungan revolusi atau kepentingan nasional”.

Hal inilah yang membuat persoalan badan peradilan pada awal Orde Baru mendapat perhatian lebih besar daripada masa sebelumnya, terutama adanya perubahan pandangan terhadap negara hukum, pandangan yang



sangat menekankan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perseorangan dan pembatasan atas kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain.

Publik telah mengetahui dan mafhum bahwa pada periode Orde Lama dan Orde Baru terdapat masalah utama yang dihadapi oleh kekuasaan kehakiman berkenaan dengan intervensi kekuasaan dan kepentingan politik serta eksekutif. Intervensi tersebut dilakukan melalui:

1. Kedudukan mahkamah ditempatkan sebagai bagian dari instrumen kekuasaan politik Orde Lama untuk menjalankan politik "revolusioner" dari kekuasaan.
2. Pada periode Orde Baru, mahkamah tidak lagi secara eksplisit menjadi bagian dari kepentingan, tetapi ada "kontrol politik" terhadap tugas dan wewenang mahkamah. Kontrol yang dimaksud, antara lain mekanisme rekrutmen hakim agung, pemilihan dan pengangkatan ketua mahkamah, kontrol eksekutif atas promosi dan mutasi para hakim di lingkungan mahkamah, serta politik anggaran yang disusun dan dirumuskan dengan campur tangan yang cukup intensif dari birokrasi pemerintahan.

Dengan keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1967 pada 28 Maret 1967, pemerintah membentuk Panitia Interdepartemental Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Selanjutnya, dengan Keppres Nomor 271 Tahun 1967 pada 29 Desember 1967, panitia tersebut diganti menjadi panitia negara dengan tugas yang sama, yaitu meninjau kembali kedua undang-undang tersebut dengan menyiapkan rancangan undang-undang baru sebagai penggantinya. Pada 30 Juni 1968, panitia tersebut berhasil merampungkan tugas-tugasnya dan pada 13 Agustus 1968, presiden secara resmi menyampaikan kedua rancangan undang-undang tersebut kepada Ketua DPRGR untuk dibicarakan dan mendapat persetujuan. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berhasil disetujui DPRGR dan kemudian disahkan serta



diundangkan pada 17 Desember 1970 sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Undang-Undang tersebut menentukan 4 jenis "peradilan" untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Peradilan Umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.
2. Peradilan Agama diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
3. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
4. Peradilan Militer diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

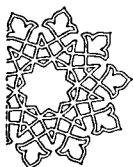
Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengaturnya dalam pasal 1 dan pasal 4 ayat (3). Ketentuan pasal 1 bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

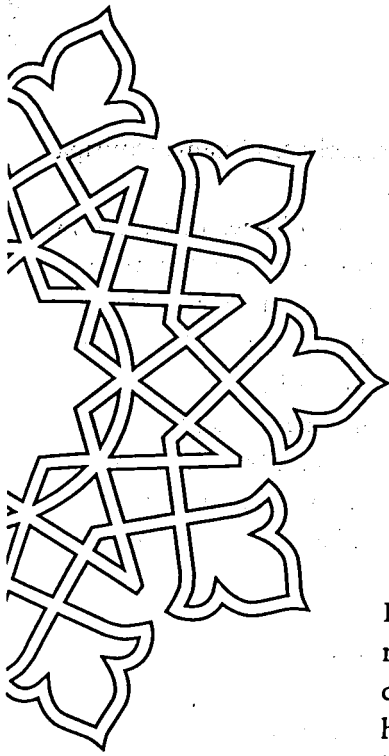
Ketentuan pasal 4 ayat (3) merupakan penguatan pasal 1 bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar".

Berbagai uraian yang dikemukakan memperlihatkan tantangan lain yang kini muncul yang ditengarai dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kekuasaan kehakiman secara terhormat dan bermartabat dengan akuntabilitas yang tinggi guna menegakkan hukum dan keadilan.

Latihan

1. Jelaskan posisi peradilan agama pada masa Orde Lama dan hubungannya dengan penegakan hukum serta keadilan!
2. Jelaskan perubahan institusi badan peradilan agama pada masa Orde Lama!
3. Jelaskan bagaimana kekuasaan kehakiman pada masa Orde Lama!
4. Jelaskan posisi peradilan agama dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman!



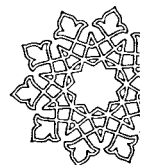


8

Peradilan pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kedudukan hukum Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku. Pada masa berikutnya, hukum Islam mulai mewarnai hukum nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik yang berlaku nasional maupun khusus bagi umat Islam. Gejala mutakhir perkembangan hukum Islam adalah munculnya gerakan otonomisasi hukum Islam di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam.

Penamaan lembaga peradilan agama di Indonesia pada masa Orde Lama masih simpang siur. Seakan-akan lembaga peradilan agama tidak memiliki nama yang pasti karena pada waktu itu banyak penamaan untuk lembaga peradilan



agama di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan nama lembaga peradilan agama di tiap tempat.

Nama lembaga peradilan agama tingkat pertama di Jawa dan Madura disebut Pengadilan Agama, kemudian di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan disebut *Kerapatan Qadhi*, sedangkan nama Pengadilan Agama tingkat banding di Jawa dan Madura disebut Mahkamah Islam Tinggi serta di Kalimantan Utara dan Selatan disebut Mahkamah *Syari'ah*.¹

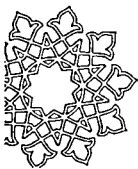
Melihat keragaman nama lembaga peradilan pada masa Orde Lama, Letnan Jenderal TNI Alam Syah yang menjabat sebagai Menteri Agama RI mulai melakukan langkah maju, yaitu dengan menyeragamkan nomenklatur peradilan agama sebagai upaya ke arah unifikasi hukum (penyatuan atau penyeragaman hukum).

Penamaan peradilan agama pada masa Orde Baru tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980. Sejak saat itu, sebutan nama (nomenklatur) Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan tingkat pertama diseragamkan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.² Sejak dikeluarkan surat keputusan tersebut, lembaga peradilan agama di Indonesia memiliki identitas pasti, tidak ada lagi kebimbangan untuk menyebut lembaga peradilan agama.

Lembaran baru bagi pencerahan dunia peradilan agama di Indonesia mulai tergores karena pada 29 Desember 1989, RUUPA (Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama) yang ditunggu-tunggu dengan pengharapan yang beragam, disahkan menjadi Undang-Undang Negara, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Ismail Unnu, UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan bukti nyata besarnya pemahaman pemerintah terhadap aspirasi umat Islam yang mendambakan adanya UU yang secara khusus mengatur tentang peradilan agama.

1 Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 144.

2 *Ibid.*



Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Pengadilan Agama di Indonesia sehingga menjadi mandiri dan berdiri sama tinggi dengan peradilan lainnya. Undang-undang tersebut bukan hanya mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan acara peradilan dalam lingkungan peradilan agama, melainkan yang sangat mendasar, yaitu dicabutnya berbagai aturan yang selama ini mengganjal, baik mengenai perbatasan, jangkauan, dan penerapan hukum Islam bagi umat Islam di Pengadilan Agama, seperti yang tertera pada pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1957 (masih kuatnya pengaruh *recepti* hukum Islam baru bisa diterapkan apabila sesuai dengan hukum adat), maupun mengenai ketergantungan Pengadilan Agama kepada pengadilan negeri berkenaan dengan pengukuhan, sebagaimana tertera dalam pasal 63 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.³

Melalui pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 1989, keberadaan *Staatblad* 1882 Nomor 152 tentang Peradilan Agama di Madura dan Jawa, *Staatblad* 1937 Nomor 116 dan 610 tentang Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura, *Staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639 tentang *Kerapatan Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi* Besar di sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur, PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Mahkamah Syariat di luar Jawa dan Madura, dan pasal 63 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengukuhan Keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, secara yuridis dikatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, peradilan agama sebagai peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai kelompok masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam, menjadi sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia (PN, PTUN, dan PM).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hierarki pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki hubungan ganda, yakni:

1. Hubungan fungsional dengan Mahkamah Agung, yaitu segi yuridiksi/ administrasi pengadilan.

3 *Ibid*, hlm. 145.



2. Hubungan struktural dengan Departemen Agama, yaitu segi administrasi umum yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, sarana, dan finansial.

Undang-undang tersebut juga sekaligus menghapus sebutan Pengadilan Agama sebagai pengadilan semu (kuasi pengadilan), pengadilan yang kerempeng (hidup segan, mati pun tak mau). Pengadilan Agama telah memiliki regulasi yang kuat, yang mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.⁴

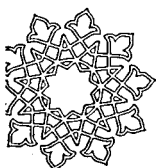
Pada awal pemerintahan Orde Baru, tindakan pertama yang dilakukan dalam angka penataan pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara murni berdasarkan kehendak UUD 1945, sesuai dengan ketentuan ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 adalah bahwa pemerintah bersama DPR-GR mengadakan peninjauan atas UU Nomor 19 Tahun 1964 dan UU Nomor 6 Tahun 1969 yang menghendaki adanya UU tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang baru (penggantinya). Sebagai realisasinya, pada 17 Desember 1970 disahkan dan diundangkan UU Nomor 14 Tahun 1970.

Berdasarkan undang-undang tersebut, keberadaan peradilan agama semakin kokoh sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1, kedudukannya setara dengan peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekokohnya semakin menonjol setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 2 Januari 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif pada 1 Oktober 1975. Kemudian disusul dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf beserta pelaksanaannya.

Dengan dikeluarkannya Perpu tersebut, selain memperkuat keberadaan peradilan agama, juga memperluas beban tugasnya. Tidak dapat dipungkiri pula pengesahan Perpu tersebut menggugah dan membangkit-

4 Ibid.



kan kembali peran serta fungsi badan peradilan agama sehingga perkara yang masuk naik setiap tahun. Sebagai indikasi, pada 1974 terdapat 28.650 perkara, pada 1975 naik menjadi 48.000 perkara, dan pada 1976 sebanyak 142.069 perkara.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, kasasi atau perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama mulai diajukan ke MA, sementara hukum acara yang harus dimiliki tentang kasasi sesuai kehendak pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970 belum ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada 26 November 1977 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1977 tentang Jalan Pengadilan dalam Pemeriksaan Kasasi untuk Perkara Perdata dan Perkara Pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, disertai Surat Edaran (SE), MA/Pemb/0921/1977.

Dengan demikian, baik Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Qadhi besar, maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi, tidak berlaku lagi.⁵

Untuk sementara, sampai dengan dimilikinya UU tentang susunan kekuasaan dan acara peradilan agama yang berintegrasi sesuai kehendak pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970, demi keseragaman warna peradilan agama yang selama ini berbeda-beda akibat keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (*staatblad* 1882 No. 152, *staatblad* 1937 No. 116 dan 610, *staatblad* 1937 No. 638 dan 639, PP No. 45 Tahun 1957), keputusan Menteri Agama pada 28 Januari 1980 No. 6 Tahun 1980 telah menyatakan bahwa pengadilan tingkat banding adalah PTA.

Dengan demikian, nama Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, serta Mahkamah Syari'ah Provinsi sudah tidak digunakan lagi. Untuk dapat menetapkan dan memegang teguh tugas serta fungsi Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di jajaran kekuasaan kehakiman di negara ini, pada 27 Maret 1982, Presiden RI mengangkat seorang ketua muda MA urusan lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, tugas pembinaan teknis yustisial atas

5 Journal.uui.ac.id.



Pengadilan Agama yang sebelumnya dilakukan langsung oleh Departemen Agama, telah menjadi wewenang penuh Mahkamah Agung/sesuai kehendak UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

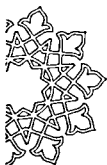
Pada 1982, pemerintah, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982, membentuk beberapa cabang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama untuk Indonesia tengah dan timur, seperti NTT, Timor Timur, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Islam Tinggi) Surakarta dipindah kembali ke Jakarta. Untuk pengadilan tingkat banding di Provinsi Jawa Tengah, didirikan cabang Pengadilan Tinggi Agama di Semarang.⁶

Pada akhirnya, sebagai puncak dari kekokohan dan kemapanan badan peradilan agama sebagai suatu bagian dari Peradilan Negara di Indonesia ditandai dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA pada 27 Desember 1989, mengenai susunan kekuasaan dan acara peradilan agama. Dengan disahkannya UU tersebut, terpenuhilah sudah kehendak dari pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang kesetaraan dan kesejajaran peradilan agama dengan peradilan negara yang lain. Hal tersebut karena peradilan agama sudah tidak lagi harus menggantungkan pada peradilan negeri dalam hal melaksanakan putusannya (eksekusi), dan tidak lagi memerlukan pengukuhan atas putusan-putusan Pengadilan Agama yang punya kekuatan hukum tetap sebelum dijalankan oleh para pihak pencari keadilan. Peradilan agama menjadi bagian dari peradilan negara yang mandiri.

Sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 berlaku, dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, sebagian merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, dan sebagian lagi produk pemerintah Indonesia. Dasar hukum tersebut meliputi berbagai Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura (*Staatblad* Tahun 1882 Nomor 152 serta *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).

6 Jurnal.uui.ac.id.



2. Peraturan tentang *Kerapatan Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi Besar* untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639*).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syari'ah* di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).
4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, penyelenggaraan peradilan Islam didasarkan pada peraturan yang sama atau seragam. Penyeragaman dilakukan sebagai upaya penerapan konsep wawasan Nusantara di bidang hukum dan sebagai pelaksanaan politik hukum nasional, sebagaimana diamanatkan dalam GBHN. Penyeragaman juga dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 jo; UU Nomor 35 Tahun 1999.

Kedudukan Peradilan Agama pada Masa Orde Baru

Kedudukan peradilan agama, sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, terdapat ketidaksejajaran antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan yang lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu tercermin dengan adanya pranata pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sejajar dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 UU Nomor

7 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Grafindo Persada: Jakarta) hlm. 126.



1 Tahun 1974, dinyatakan dicabut. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh juru sita. Kejurusitaan merupakan pranata baru dalam susunan organisasi Pengadilan Agama.

Kedudukan Hakim pada Masa Orde Baru

Menurut ketentuan pasal 15 ayat 1, hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama berlaku bagi hakim dalam lingkungan peradilan umum dan hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh pemerintah lainnya.

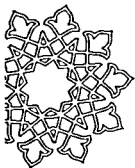
Wewenang pengadilan menurut ketentuan pasal 49 ayat 1: peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
3. Wakaf dan sedekah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di Jawa dan Madura dikembalikan, sebagaimana wewenang yang berlaku sebelum 1937. Dengan perkataan lain, wewenang pengadilan tersebut lebih luas dibandingkan pada masa sebelumnya (1937-1989).

Sementara itu, wewenang Pengadilan Agama lainnya tidak mengalami perubahan. Walaupun demikian, menurut PP Nomor 45 Tahun 1957, wewenang tersebut (selain perselisihan antara suami-istri), juga berhubungan dengan "hukum yang hidup" diputus menurut hukum agama Islam. Kini, pengganti hukum yang hidup itu adalah hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum UU tersebut.⁸

8 *Ibid*, hlm. 127.

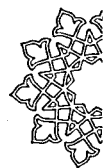


Dari segi susunan, Pengadilan Agama tidak berbeda dengan susunan Pengadilan Negeri yang terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Tetapi, yang paling memberi makna adalah keberadaan juru sita sebagai piranti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam lingkungan peradilan agama. Juru sita adalah yang kemudian membedakan dengan susunan Pengadilan Agama sebelumnya sehingga Pengadilan Agama sejajar dengan pengadilan lainnya. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri yang dilaksanakan oleh juru sita. Kedudukan dan kemandirian peradilan agama lebih kuat berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 pascaamandemen.

Melalui juru sita, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti", maka peradilan agama dapat melakukan panggilan, penyitaan, dan eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak lagi harus bergantung kepada pengadilan negeri karena peradilan agama sudah memiliki kekuatan hukum untuk dapat meng-eksekusi putusannya sendiri.

Hukum Acara

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, menurut ketentuan pasal 54, adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum tertulis, di samping adanya kekecualian dan kekhususan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Kekhususan meliputi prosedur cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina, dan biaya perkara. Sebelum berlakunya UU tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama tersebar dalam berbagai sumber, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.



Penyelenggaraan Administrasi

Terdapat dua jenis penyelenggaraan administrasi di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, yaitu administrasi peradilan dan administrasi umum. Jenis pertama berkenaan dengan administrasi perkara dan teknis yudisial, sedangkan jenis kedua berkenaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum. Oleh karena itu, di pengadilan terdapat dua jenis jabatan pengelola administrasi. Secara keseluruhan, kedua jenis administrasi tersebut dikelola oleh penitera yang merangkap sebagai sekretaris peradilan. Secara khusus, administrasi peradilan dikelola oleh wakil panitera, sedangkan administrasi umum dikelola oleh wakil sekretaris. Sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, administrasi pada peradilan bercorak tunggal dan dikelola oleh panitera kepala.

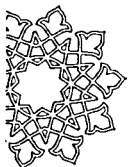
Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkannya lagi PP No. 28 Tahun 1977, wewenang peradilan agama semakin luas dan mantap.⁹

Legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik berlaku efektif mulai 1 Oktober 1975. Sebagai produk politik, undang-undang perkawinan merupakan kompromi berbagai kekuatan politik dengan aspirasi hukumnya masing-masing. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dengan ketentuan ini berarti terjadi perubahan hukum dari yang rasial etnis (pada masa kolonial) menjadi hukum yang berdasar keyakinan agama.

UU No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Institusi peradilan Islam juga menempati posisi yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,

9 *Peradilan Agama di Indonesia*, Departemen Agama RI, hlm. 33.



Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jenis peradilan tersebut meliputi peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Penjelasan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan bahwa Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus. Kompetensinya menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan-golongan tertentu. Dengan demikian, peradilan agama merupakan peradilan negara, yaitu peradilan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku khusus untuk umat Islam.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama semakin jelas dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi peradilan agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Dalam Bab III pasal 49-53, kewenangan peradilan agama meliputi bidang-bidang hukum perdata, antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf dan sedekah. Dari bidang-bidang tersebut, dapat dikatakan bahwa yurisdiksi peradilan agama adalah bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan kompetensinya, diperlukan hukum materiil sebagai pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, hakim peradilan agama menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusannya. Kitab fikih yang digunakan antara satu peradilan agama dan peradilan agama yang lain tidak sama. Hal ini mengakibatkan adanya putusan yang berbeda dalam masalah yang sama. Kondisi tersebut memunculkan pemikiran untuk menyusun kodifikasi hukum Islam sebagai panduan dalam menangani perkara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dikeluarkan putusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985 No. 07/



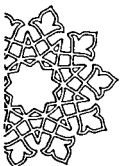
KMA/1985 dan No. 25 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pengembangan Hukum Islam. Proyek ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui empat jalur, yaitu jalur kitab fikih, wawancara, yurisprudensi, dan studi komparatif ke negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum nasional. Setelah disetujui, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada 10 Juni 1991 sebagai dasar penyebarluasannya. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada 22 Juli 1991. Format KHI terbagi ke dalam tiga buku, yaitu:

1. Buku satu berisi tentang hukum perkawinan.
2. Buku dua tentang hukum kewarisan.
3. Buku tiga tentang hukum perwakafan.

Keinginan umat Islam untuk memberlakukan hukum Islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam hal obat dan makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu, muncul aksi-aksi sosial untuk menegakkan hukum Islam, seperti pelarangan SDSB, kebebasan berjilbab di sekolah dan kantor. Di samping itu, muncul perundang-undangan yang mendukung terlaksananya hukum Islam, seperti UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan deskripsi tersebut, formatisasi hukum agama Islam dalam hukum nasional dapat berupa hukum umum yang berlaku nasional atau menjadi hukum khusus yang berlaku bagi umat Islam saja. Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (di dalamnya diakui keberadaan bank Islam). Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 17 Tahun



1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰

Perkembangan peradilan agama di Indonesia pada masa kemerdekaan, khususnya pada masa Orde Baru, sangat berarti ketika diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974, serta mencapai puncaknya ketika UU Nomor 7 Tahun 1989 diundangkan dan diberlakukan. UU Nomor 14 Tahun 1970 memberikan tempat kepada peradilan Islam sebagai salah satu peradilan negara dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. UU Nomor 1 Tahun 1974 memperbesar kekuasaan peradilan agama di Indonesia, khususnya di bidang perkawinan. Sedangkan UU Nomor 7 Tahun 1989 memperkokoh kedudukan peradilan agama dan memulihkan kembali kekuasaannya yang terenggut selama 52 tahun. Hal itu terjadi karena di satu pihak kebijakan politik Islam lebih realistis, dan di pihak lain umat Islam memiliki kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan peristiwa paling penting dalam perkembangan peradilan agama. Hal tersebut ditandai dengan beberapa perubahan, antara lain:

1. Dasar penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia yang seragam.
2. Kedudukan peradilan agama yang sejajar dengan peradilan lainnya.
3. Kedudukan hakim yang semakin kokoh.
4. Pemulihan kembali kekuasaan peradilan agama.
5. Hukum acara yang lebih jelas dan tertulis.
6. Administrasi peradilan lebih proporsional.
7. Perlindungan terhadap kaum wanita.

Salah-satu aspek yang berkaitan dengan perkembangan peradilan agama ialah dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam. Ia merupakan bentuk penyelesaian masalah keragaman hukum substantial dalam melaksanakan tugas dan wewenang peradilan agama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di kalangan orang-orang yang beragama Islam.

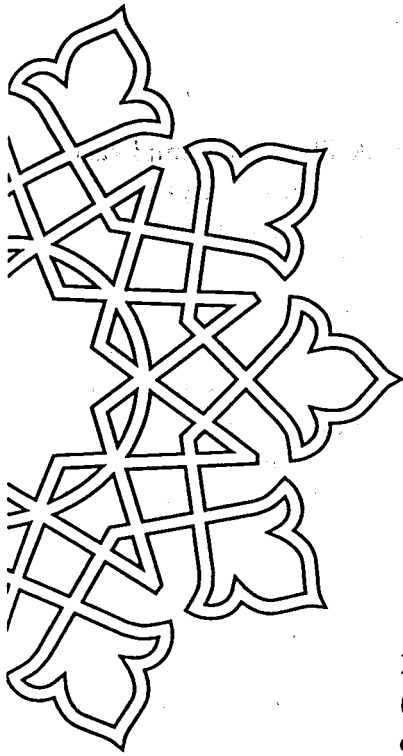
¹⁰ <http://artikelilmiah lengkap.blogspot.com>.



Latihan

1. Gambarkan bagaimana peradilan pada masa Orde Baru!
2. Bagaimana kekuasaan peradilan agama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama?





9

Peradilan Islam pada Masa Reformasi

Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (*one roof system of judicial*) merupakan salah satu contoh bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di tangan eksekutif. Mahkamah Agung melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis yustisial. Di negeri ini, kekuasaan kehakiman tidak independen karena masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, tuntutan muncul dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*).

Sistem peradilan satu atap merupakan kebijakan yang potensial menimbulkan



implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (implikasi yang perlu diantisipasi). Dengan demikian, sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadai sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah membangun moral dari aparat penegak hukum, termasuk dapat ditempuh melalui jalur pendidikan hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan nilai (*values*) sehingga para calon penegak hukum yang dihasilkan nantinya, di samping memiliki keahlian di bidang hukum, juga menjunjung tinggi moral dan etika. Termasuk dalam hal ini, peradilan agama yang telah memiliki kompetensi selain di bidang hukum keluarga juga hukum perdata lain, dalam hal ini yang berkaitan dengan ekonomi syariat dengan sistem satu atap, diperlukan SDM hakim Pengadilan Agama yang benar-benar menguasai bidang ekonomi syariat.

Dalam pasal 1 Undang-Undang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Penyelenggaraannya, sebagaimana dalam pasal 1, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian, pada era Reformasi, setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap UUD 1945, terdapat dua lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman (*judicial power*), yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama dalam Sistem Satu Atap

Pergeseran kekuasaan dari rezim Orde Baru ke pemerintahan Orde Reformasi membawa berbagai perubahan dalam ranah sosial, politik, dan hukum. Perubahan mendasar dalam bidang hukum, yakni dilakukannya



amandemen atas UUD 1945. Salah satu pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni keberadaan Mahkamah Konstitusi. Selengkapanya, rumusan hasil amandemen atas pasal 24 ayat (2) 1945 yang berbunyi: "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ketentuan konstitusi ditindaklanjuti oleh lahirnya UU NO. 35 Tahun 1999 tentang Sistem Peradilan Satu Atap; UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Amandemen atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman); dan UU No. 48 Tahun 2009 (amandemen atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Lahirnya berbagai peraturan tersebut menunjukkan adanya tekad yang kuat dan bulat dalam usaha penguatan terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dalam ranah hukum, sekaligus sebagai wujud nyata pengawasan terhadap perubahan mendasar dalam sistem peradilan, yakni dari "sistem peradilan mendua", yang berpijak di atas dua kaki berubah ke sistem peradilan satu atap. Melalui UU No. 4 Tahun 2004, yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditetapkan pengalihan kewenangan yang berhubungan dengan masalah penyelenggaraan, kekuasaan, dan kewenangan lembaga peradilan. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung".

Pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan



posisi peradilan agama. *Pertama*, secara organisatoris, administratif, dan finansial, badan peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa peradilan agama yang sejak kemerdekaan Indonesia berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama menjadi satu atap di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pengalihan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung banyak menuai pro-kontra dalam lingkungan masyarakat Islam, terutama para elite politik dan tokoh agama Islam. Walaupun demikian, pada akhirnya semua pihak dapat memahami dan menerima mengenai kebijakan pengalihan itu. Proses pengalihan badan peradilan agama yang seharusnya dilakukan pada 30 Juni 2004 oleh Menteri Agama kepada Mahkamah Agung mengalami sedikit penundaan karena alasan teknis.

Berkenaan dengan kebijakan sistem peradilan satu atap, dilakukan pula langkah-langkah adaptasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan badan peradilan agama. Untuk itu, dilakukan dua kali amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu melalui UU No. 3 Tahun 2006 yang diundangkan pada 28 Februari 2006 dan melalui UU No. 50 Tahun 2009 yang diundangkan pada 29 Oktober 2009.

Beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia melalui UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Agama maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.



3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*.
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian hakim.
5. Keamanan dan kesejahteraan hakim.
6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
8. Bantuan hukum.
9. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pendekatan yang dilakukan dalam amandemen tersebut bersifat “adendum”, artinya rumusan peraturan lama yang terdapat dalam pasal-pasal itu secara tekstual masih tetap tertulis mendampingi pasal-pasal baru hasil amandemen. Dalam hal ini, pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 masih tetap berlaku asalkan tidak ditetapkan lain dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur administrasi baru tentang susunan peradilan agama (hakim-hakim agama) dan memperluas kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 mengalami perubahan, baik melalui amandemen pertama, yakni UU No. 3 Tahun 2006 maupun melalui UU No. 50 Tahun 2009. Di antara perubahan itu, berkenaan dengan adanya pengkhususan pengadilan, dalam pasal 3A UU No. 3 Tahun 2006, sebagai sisipan antara pasal 3 dan pasal 4, disebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur undang-undang. Pada amandemen kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diatur dalam UU No. 50 tahun 2009, pasal 3A mengalami perubahan dan penekanan makna sehingga menjadi:

1. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenang-



annya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Peradilan Agama Sejak Amandemen

Sejak digulirkannya Reformasi pada 1997, terjadi perubahan yang mendasar di berbagai bidang, termasuk lembaga-lembaga negara serta sistem penyelenggaraan kekuasaan negara, juga terdapat perubahan yang menyangkut susunan, tugas, maupun wewenangnya yang diharapkan dengan perubahan tersebut dapat mengarah pada Indonesia baru yang lebih demokratis, lebih representatif sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law* sehingga cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

Berikut adalah deskripsi singkat tentang lembaga dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara pascaamandemen UUD 1945: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dalam UUD 1945 hasil amandemen juga menetapkan pembentukan lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya juga sangat signifikan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY).

Landasan pemikiran dilakukan amandemen berkaitan dengan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas prinsip negara berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat [3]) dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*, yakni mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim; sistem konstitusional berdasarkan



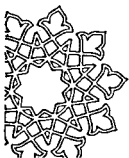
perimbangan kekuasaan (*check and balances*), yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing; setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945; menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum; penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Sebagai gambaran singkat tentang bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara, penulis jelaskan sebagai berikut:

1. MPR
 - a. Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
 - b. Menghilangkan supremasi kewenangannya.
 - c. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
 - d. Menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui Pemilu).
 - e. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
 - f. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
2. DPR
 - a. Posisi dan kewenangannya diperkuat.
 - b. Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
 - c. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan pemerintah.
 - d. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antarlembaga negara.
3. DPD
 - a. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat



- nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
- b. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
 - c. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui Pemilu.
 - d. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
4. BPK
- a. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - b. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
 - c. Berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - d. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
5. Presiden
- a. Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
 - b. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
 - c. Membatasi masa jabatan presiden maksimal menjadi dua periode.
 - d. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
 - e. Kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
 - f. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.



6. Mahkamah Agung
 - a. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat [1]).
 - b. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.
 - c. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 - d. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, seperti kejaksanaan, ke-polisian, advokat/pengacara, dan lain-lain.
7. Mahkamah Konstitusi
 - a. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*).
 - b. Mempunyai kewenangan.
 - c. Menguji UU terhadap UUD.
 - d. Memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
 - e. Hakim Konstitusi terdiri atas 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, serta pemerintah, dan ditetapkan oleh presiden sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Pedoman Kode Etik Perilaku Hakim

Dalam konteks negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai panglima, lembaga peradilan merupakan jalan terakhir yang diharapkan dapat mendamaikan, bahkan menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa. Untuk terwujudnya tujuan lembaga peradilan tersebut, harus ada seorang



hakim dalam suatu perkara karena hakim merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, seorang hakim harus memenuhi aturan yang disahkan oleh ketua Mahkamah Agung Nomor: 24/KMA/1984, tertanggal 2 Desember 1984 tentang kode etik hakim, antara lain:

1. Berperilaku adil

Adil dapat diartikan dengan “menempatkan sesuatu kepada tempatnya dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

a. Keharusan dan larangan hakim

- 1) Hakim tidak boleh memberikan kesan bahwa salah satu pihak istimewa.
- 2) Hakim tidak boleh membedakan salah satu pihak.
- 3) Hakim harus mendorong perangkat peradilan, seperti advokat dan penuntut.
- 4) Hakim tidak boleh berpihak.
- 5) Hakim harus memberikan keadilan bukan untuk menghukumnya.

b. Mendengar kedua belah pihak; hakim harus memberikan hak yang sama dalam berbicara, dan seorang hakim tidak boleh mengadakan pertemuan, kecuali di lingkungan gedung peradilan untuk membahas kepentingan kelancaran hukum.

2. Berperilaku jujur

Jujur adalah berani mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah, selalu melaporkan apabila diberi hadiah, serta selalu melaporkan kekayaan.

3. Berperilaku arif dan bijaksana

Seorang hakim yang berperilaku arif dan bijaksana akan mampu bertindak dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.

4. Bersikap mandiri

Seorang hakim harus mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan orang lain, dan bebas dari pengaruh orang lain.

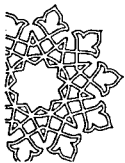


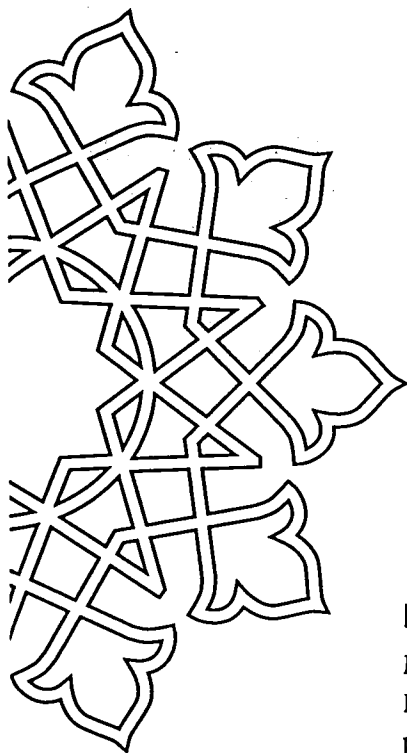
5. **Berintegritas tinggi**
Integritas tinggi adalah mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Untuk tercapainya integritas tinggi harus menghindari beberapa hal, di antaranya:
 - a. Menghindari hubungan dengan pihak lain.
 - b. Konflik kepentingan.
 - c. Tata cara mengundurkan diri.
6. **Bertanggung jawab**
Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang dengan sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang itu.
7. **Tinggi harga diri**
Jika seorang hakim mempunyai sikap menjunjung tinggi harga diri, kehormatan dan martabatnya akan terjaga.
8. **Disiplin tinggi**
Suatu sikap yang bermakna ketaatan pada aturan atau norma yang dianggapnya sebagai suatu nilai kebenaran. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, mengemban amanah.
9. **Berperilaku rendah diri**
Rendah hati pada hakikatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari keangkuhan diri.
10. **Bersikap profesional**
Pada hakikatnya bermakna suatu moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian dan dasar pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang luas.



Latihan

1. Jelaskan bagaimana peradilan Islam pada masa Reformasi!
2. Jelaskan yang Anda ketahui tentang peradilah agama dalam sistem satu atap!
3. Jelaskan bagaimana peradilan agama sejak amandemen!
4. Jelaskan bagaimana pedoman kode etik perilaku hakim!





10

Mediasi di Pengadilan Agama

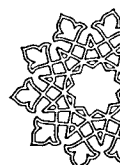
Pengertian Mediasi

Menurut bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti di tengah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam mediasi terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator diharuskan bersikap adil atau netral, tidak memihak salah satu dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam pengertian lain, mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar lembaga peradilan. Maksudnya, mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antar-dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian.

Sejarah dan Dasar Hukum Mediasi

Sebenarnya, penyelesain sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam hukum



Islam. Hanya, pada waktu itu bukan bernama mediasi, melainkan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan kepada seseorang dan menerima putusan itu. Pada intinya, *tahkim* dan mediasi itu sama, yaitu menyelesaikan persengketaan dengan cara mufakat dengan menghadirkan pihak ketiga (orang yang dianggap netral) yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Tahkim, sebagaimana dimaksud, telah dipraktikkan sejak masa awal Islam. Rasulullah pun pernah mempraktikannya, misalnya ketika ia menerima putusan Sa'ad Ibnu Mu'adz mengenai Bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar Bin Khatab r.a. dan Ubay Bin Ka'a tentang kebun kurma, perkaranya di-*tahkim*-kan oleh Zaid Bin Tsabit.

Tahkim pun dibahas dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Manshur dan Ibnu Jarir dari Abu Malik yang menyatakan bahwa: "*Dua orang lelaki muslim saling memaki dan menghina yang menyebabkan dua kelompok bertengkar*". Hadis ini pun menjadi sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yang berkenaan dengan *tahkim*. Adapun surah lainnya, yaitu surah An-Nisa ayat 35 dan 128.

Di Indonesia, pranata sosial hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam di luar pengadilan sudah dikenal sejak Islam berkembang (sekitar abad ke-13). Adapun mediasi masuk ke ranah pengadilan secara efektif, dimulai sejak lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2003. Mediasi diposisikan sebagai salah satu upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Kehadiran mediasi dalam pengadilan memiliki legitimasi yang sangat kuat karena secara spesifik didukung oleh UU No. 7 Tahun 1989 jo; UU No. 3 Tahun 2006; UU No. 50 Tahun 2009; dan UU No. 48 Tahun 2009.

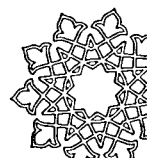


Proses Mediasi di Pengadilan Agama (Perma No. 1 Tahun 2008)¹

Terdapat beberapa tahap mediasi yang harus dilalui ketika seseorang/ kelompok bersengketa dengan orang lain/kelompok, di antaranya:

1. Tahap pramediasi
 - a. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
 - c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
 - d. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
 - e. Apabila dalam jangka waktu tersebut, dalam poin 4, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara sebagai mediator.
2. Tahap proses mediasi
 - a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan *resume* perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
 - b. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim.
 - c. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
 - d. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus (pertemuan tertutup).
 - e. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

¹ Perma No. 1 Tahun 2016



3. Mediasi mencapai kesepakatan
 - a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - b. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
 - c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
 - d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "akta perdamaian".
 - e. Bila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, mereka harus membuat klausul pencabutan gugatan dan/atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.
4. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
 - a. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
 - b. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
 - c. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
5. Tempat penyelenggaraan mediasi
 - a. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
 - b. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.
6. Perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali

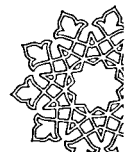


- a. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat banding/kasasi/peninjauan kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
- b. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara banding) atau ketua Mahkamah Agung (bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- c. Hakim banding/kasasi/peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
- d. Para pihak melalui ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim banding/kasasi/peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.
- e. Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding/kasasi/peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Kesepakatan di Luar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 telah memberikan ruang yang luas kepada para pihak yang bersengketa untuk berdamai dan menyelesaikannya di luar pengadilan (nonlitigasi). Selanjutnya, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang dapat menjadi pegangan dan dapat mengikat para pihak, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, di antaranya:

1. Para pihak, dengan mediator bersertifikat, yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
2. Pengajuan gugatan, sebagaimana disebutkan pada poin 1, harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

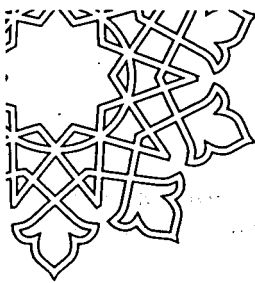


3. Di hadapan para pihak, majelis hakim hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, apabila kesepakatan tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. Sesuai kehendak para pihak.
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum.
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga.
 - d. Dapat dieksekusi.
 - e. Dengan itikad baik.

Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mediasi di Pengadilan Agama!
2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kesepakatan di luar pengadilan!





Lampiran 1

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
 - c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh



- proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
 - e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat: 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.



10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.



- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;



8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.



Bagian Keempat Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.



Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.



- (3) Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan **Tata Kelola Mediasi di Pengadilan**

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III **MEDIATOR**

Bagian Kesatu **Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga**

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya



Bagian Ketiga Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikutan akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;



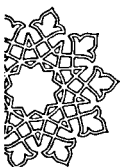
- c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
- a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua

Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
 - a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.



- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat **Batas Waktu Pemilihan Mediator**

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.



- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Bagian Keenam Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

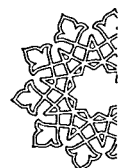
- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.



- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.



BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Keempat **Mediasi Mencapai Kesepakatan**

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan meneliti-nya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

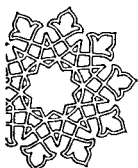
Bagian Kelima **Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.



- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:



- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

BAB VI

PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa



Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.



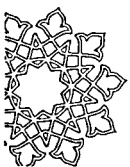
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.
- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.



Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016
KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016

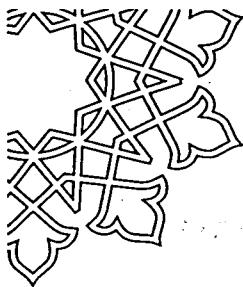
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175





Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.



BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.



Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 12

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 13

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 14

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.



Pasal 15

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Pasal 16

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 17

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.



BAB III

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 19

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Kedua

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Pasal 20

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.



Pasal 21

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 25

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 27

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

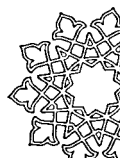
Pasal 28

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

Bagian Ketiga Mahkamah Konstitusi

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:



- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal 30

- (1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier.
- (2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Pasal 31

- (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.



- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 32

- (1) Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 34

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
- (2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- (3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Bagian Kedua

Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal 36

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.



Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

BAB V

BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 38

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB VI

PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal 39

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.



Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44

- (1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.



BAB VII PEJABAT PERADILAN

Pasal 45

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita.

Pasal 46

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. hakim;
- b. wali;
- c. pengampu;
- d. advokat; dan/atau
- e. pejabat peradilan yang lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Pasal 48

- (1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- (2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB IX PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 51

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 52

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Pasal 53

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.



- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI BANTUAN HUKUM

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.



- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

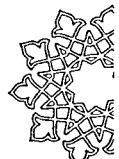
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

- kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.



Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.



- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kekuasaan yang sah" adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penindakan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "berbeda" dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

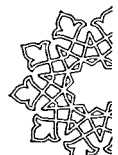
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hakim karier" adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan "hakim nonkarier" adalah hakim yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

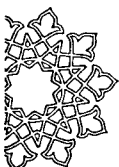
Yang dimaksud dengan "merangkap jabatan" antara lain:

- a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- b. pengusaha; dan
- c. advokat.

Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain.

Pasal 32

Ayat (1)



Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan



keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” antara lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan Kejaksaan.

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan hukum" adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencari keadilan yang tidak mampu" adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

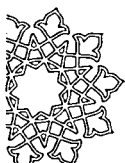
Cukup jelas.

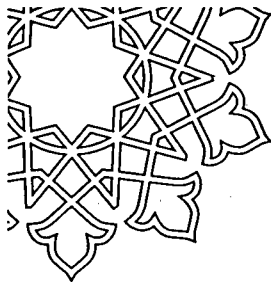
Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5076

Salinan sesuai dengan aslinya.





Daftar Pustaka

- Abdullah (ed.), Taufiq. 1987. *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah, Abdul Gani. 1991. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 2000. *Anatomi Norma Ideal dalam Tafsir Historik Undang-Undang Peradilan Agama*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung, 11 Maret 2000.
- _____. 2006. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) Bagi Para Hakim*, dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 8 No.2, September 2006, Jakarta; Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdullah, Abdurrahman Haji. *Pemikiran Islam di Malaysia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abidin, A. Zaenal. 1970. "Rule of Law dan Hak-Hak Sosial Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional di Indonesia", *Majalah LPHN*, No. 10, 1970.
- Adam, Abdul Satar. 1969. *Al-Syar'iyah Al-Islamiyah wa Al-Qanun Al-Madani Al-Misri*, Kairo: Majlis Al-A'la li As-Suun.
- Adi, Surya. 2002. *Apa dan Bagaimana Reformasi*. Jakarta: Pustaka Intan.
- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Muhammad Daus. 1997. *Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya*, dalam *Cik Hasan Bisri, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press.
- Al-Mawardi. T.t. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.



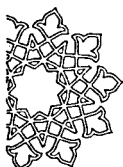
- Amos, A.F. Abraham. 2007. *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia; Analisis Sosiologis Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 1999. *Majalah Mesir: Tajdid Al-Baiat Ta'bir Shodiq An-Dhomiri al-Ummat*.
- Anonim. 2005. "Citizens" Perceptions of the Indonesian Justice Sector", Survey Report. Jakarta: The Asia Foundation.
- Anonim. 2008. "Perubahan UUD 1945, Presiden: Pemerintah Baru, Konstitusi Baru". *Kompas*. Sabtu, 26 Januari 2008.
- Aripin, Jaenal. 2009. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- ath-Thahiri, Ahmad Ibrahim. 1995. *Harakah Ath-Tasyri' wa Ushuliha fii As-Sudan*. Sudan : Al-Harakah Al-Islamiyah Al-Thulabiyah.
- Azizy, A. Qadri. 2002. *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Meida.
- Becker, Theodore L. 1978. *Comparative Judicial Politics, The Political Functioning of Courts*, London: Oxford University Press.
- Benda, Harry Jundrich. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bidiarjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Bisri, Cik Hasan. 1996. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. Rabu, 14 Maret 2012. Dalam pertemuan ketujuh Kelompok Pengajar Peradilan Islam dibahas "Model Pengkajian Peradilan Islam" (diunduh pukul 19.30 WIB. Senin, 16-09-13 dari <http://www.fshuinsgd.ac.id/?p=770>)



- Bogdanor, Vernon. 1988. "Conclusion" dalam Vernon Bogdanor (ed.), *Constitution In Democratic Politic*, N.P: N.ph.
- Colligan, D.J. 1996. *Due Process and Fair Procedures, a Study Administrative Procedures*. Oxford; Clarindon Press.
- Cunningham, W.T. Nelson. 1982. *Contemporary English Dictionary*. Canada: Thompson and Nelson Ltd.
- Dahl, Robert A. 1995. *Democracy and Its Critics*, dalam Syamsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: LP3ES.
- Denning, Brannon P. 1996. *Means to Amend: Theories of Constitutional Change*, dalam *Tennessee Law Review*.
- Dicey, A.V. 1952. *An Introduction in the Study of the Law of the Constitution*. London: English Book Society and Macmillan.
- Dirdosiswono, Soedjono. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Djalil, Basiq. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Barat dan Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Predana.
- Efendi, Bakhtiar. 1998. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Ehrlich, Eugen. 1985. dalam Soerjono Soekanto. *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Elester, John. 1995. *Forces and Mechanisms in the Constitution Making Process*, dalam *Duke Law Journal*.
- Esposito, John L. & John O. Voll. 1999. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- Friedman, Lawrence Meir. 1998. *American Law: An Introduction, second edition*. New York: W.W. Norton & Company.
- Friedrich, Carl J. 1950. *Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in Europe and American*. New York: Horn Publisher.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: Lkis.
- Gianie. 2008. *Reformasi Dihadang Krisis Pangan dan Energi*, Jajak Pendapat "Kompas" 10 Tahun Reformasi, Rubrik Politik dan Hukum, *Kompas*, edisi Senin, 12 Mei 2008.



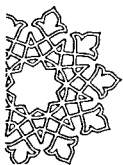
- Gibb, H.A.R. 1993. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husain. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haharap, Harief. 1973. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Buku II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harding, Andrew. 2001. *May There be Virtue: New Asian Sonstitutionalism in Thailand*, 3:3, *The Australian Journal of Asian Law*.
- Haris, Syamsudin. 2006. *Memperkuat dan Mengefektifkan Presidensialisme*, Makalah Seminar yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stifftung, Hotel Acasia, Jakarta, 13 Desember 2003.
- Hickok, Eugene W. dan Gary L. McDowell. 1993. *Justice Vs Law, Court and Politics in American Society*. New York: The Free Press.
- <http://duniaku-miftahulkhoiri.blogspot.com/2011/03/hukum-islam-pada-masa-pendudukan-jepang.html>
- <http://fauzirijal.wordpress.com/2013/01/13/sejarah-lembaga-peradilan-di-indonesia/>
- <http://kancanaasli.blogspot.com/2009/09/perkembangan-peradilan-islam-di.html> (di unduh pukul 19.30 WIB. Senin, 16-09-13)
- <http://suciyani.blogspot.com/2011/02/family-law.html>
- <http://artikelilmiah lengkap.blogspot.com>
- Hutabarat, Ramli. 2005. *Kedudukan Islam dan Kontitusi-Kontitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta.
- Hurgronje, Snouck. 1973. *Kumpulan Tulisan Mengenai Hukum Islam*. Jakarta: INIS.
- Jazuni. 2005. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Jokusutomo, Supomo. 1985. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: t.pn.
- Kamsi. 2008. *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1994. *al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Z. Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. N.I. Al-Barsany. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Khan, M.S. 2009. *Treatise of Miskawaih on Justice*, terj. Jaenudin dan Ahmad Jakia. Bandung: AlManar Press.
- Lev, Daniel S. 1972. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. California: University of California Press.
- _____. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwoo dan A.E. Priyono. Jakarta: LP3ES.
- Lotulung, Paulus E. 1999. *Reformasi Penegakkan Hukum*, dalam buku; *10 Tahun Undang-Undang PA*. Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-Undang PA, kerjasama Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan PPHIM, Jakarta: t.pn.
- Madjid, Nurcholis. 1994. *Demokrasi dan Demikratisasi di Indonesia*, dalam Elsa Pedi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Madkur, Muhammad Salam. 1993. *Al-Qadla fi al-Islam*, terj. Imran. Surabaya: Bina Ilmu.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 1999. *Himpunan Hasil Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR-RI Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif*, Jakarta: Juni 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws*, terj. M. Khairil Anam. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Muhammad, Asrun. 2004. *Krisis Peradilan: MA di Bawah Soeharto*, Jakarta: ELSAM.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Natabaya, H.A.S. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Nurrohman. 2007. *Syariat Islam, Konstitusi & HAM*. Bandung: Pustaka Al-Kasyaf.



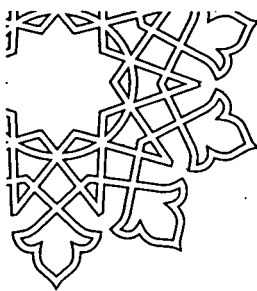
- Notosusanto, Nugroho. 1963. *Hidjau Tanahku, Hidjau Badjuku*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Paczolay, Peter. 1993. *Constitutional Transition and Legal Continuity*, 8, *Connenticut Journal of International Law*.
- Praja, S. Juhaya. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Piara
- _____. 2009. *Teori-Teori Hukum; Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Program Pascasarjana UIN SGD Bandung. 2009. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Positivisme dalam Ilmu Hukum*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- _____. 2004. *Struktur Hukum Modern*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosadi, Aden. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Russel, Peter H. 1993. *Constitutional Oddyssey; Can Canadian Become a Sovereign People?* Edisi kedua. Canada: Best Publisher.
- Sabrie, Zuffran (ed.). 1999. *Pengadilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*. Jakarta: Ditbinbapera Depag RI.
- Sachedina, Abdulaziz A. 1996. "Penciptaan Tatanan Sosial yang Adil dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan.
- Salman, R. Otje. 1999. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico.
- Scheltema, M. 1989. *De Rechtsstaat*, dalam J.W.M. Engels (et.all), *De Rechtsstaat Herdacht*, Zwollw: Tjeenk Willink.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.



- Soekanto, Soerjono. 1991. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1983. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 14 Desember 1983.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Summer, Cate (peny.). 2008. *Memberi Keadilan bagi Para Pencari Keadilan; Sebuah Laporan Tentang Pengadilan Agama Indonesia: Penelitian tahun 2007 Tentang Akses dan Kesetaraan, Rangkuman Temuan Penelitian*, Jakarta: t.pn.2008.
- Sunaryo, Oyo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam (dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supriyadi, Dedi. 2007. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surakhmad, Winarno. 1997. *Dasar-dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Receptio A Contrario; Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Thompson, Brian. 1997. *Constitution is a Document which Contains the rulers for the operation of an organisation. Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3., London: Blackstone Press Ltd.
- Tresna, R. 1978. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- van Apeldoorn, L.J. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Vollenhoven, C. Van. 1981. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia (seri terjemah)*. Jakarta: Djambatan-Inkultra Poundation Inc.
- Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Where, K.C. 1958. *Modern Constitution*. N.p: N.ph.







Indeks

A

Adil 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 46, 54,
100, 104, 107, 158

C

Check and balances 101

D

Devide et impera 55

F

Fasakh 62, 66, 67, 71, 73

Fiqh 5, 12, 29, 35

Fuqaha 23, 29, 30, 34, 35, 51

H

Hakim 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
17, 22, 25, 35, 41, 44, 46, 48, 51, 53,
54, 61, 62, 68, 77, 78, 79, 88, 89, 91,
92, 93, 96, 98, 99, 104, 105, 109,
110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158,
160, 162, 163, 164, 165

Hibah 6, 35, 66, 72, 73, 88, 91

Hukum adat 44, 45, 46, 49, 51, 60, 83

Hukum Barat 48, 49, 60

Hukum Islam 1, 6, 23, 26, 27, 28, 34,

37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 52, 53, 54, 60, 63, 66,

67, 81, 83, 88, 90, 91, 93, 108

I

Infak 6

J

Jizyah 10

Judicial power 26, 96

K

Keadilan 1, 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 26, 27, 45, 80, 86, 96,
103, 104, 113, 137, 138, 139, 152,
155, 156, 157, 158, 166

Kehakiman 2, 5, 9, 26, 61, 62, 67, 68,
70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84,
85, 86, 90, 93, 95, 96, 97, 100, 103,
114, 137, 138, 139, 143, 146, 148,
150, 153, 155, 156

Kerajaan 29, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 51



Kesultanan 27, 28, 29, 37, 42, 60

Keuchik 39

Khalifah 2, 4, 6, 7, 9, 10

Khulafaur Rasyidin 4, 9, 12

Kisas 40, 41

Kodifikasi 4, 91

Kolonial 43, 46, 52, 55, 57, 60, 61, 76,
86, 90

L

Landraad 45, 57, 61

M

Mahkamah Agung 39, 61, 69, 77, 78,
83, 85, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98,
100, 103, 104, 111, 113, 114, 115,
116, 117, 121, 122, 123, 125, 133, 135,
137, 138, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149,, 150, 155, 156,
160, 162, 163, 165

Mahkamah Konstitusi 96, 97, 100,
103, 137, 138, 143, 145, 146, 148,
155, 156

Mahkamah *Syari'ah* 82, 85, 87

Mahkamah Tinggi Islam 54

Mohammadansche Recht 47, 48

O

Orde Baru 77, 78, 79, 81, 84, 87, 88,
93, 94, 96

Orde Lama 65, 66, 67, 71, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82

P

Panitera 4, 26, 33, 35, 68, 89, 90, 116,
126, 127, 141, 142, 150, 151, 160,
164

Pengadilan Agama 40, 44, 45, 46, 47,
52, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
74, 75, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
96, 98, 107, 109, 110, 110, 111, 112

Penjajahan 27, 28, 41, 43, 49, 51, 55,
56, 57

Peradilan agama 4, 6, 23, 25, 27, 28,
31, 35, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67,
70, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96,
97, 98, 99, 100, 103, 106, 116, 120,
127, 131, 137, 138, 143, 144, 145,
155, 156

Peradilan Islam 6, 11, 12, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 42, 57, 59, 61, 63, 67,
71, 82, 87, 90, 93, 95, 106

Peradilan militer 75, 80, 84, 91, 96,
97, 103, 137, 138, 142, 143, 144, 145,
155, 156, 159

Peradilan negeri 61, 56

Peradilan tata usaha 69, 75, 80, 84,
88, 91, 97, 103, 137, 138, 143, 144,
145, 155, 156, 161

Perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 33,
35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 51, 54, 61,



62, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 78,
83, 85, 88, 89, 90, 91, 99, 103, 104,
108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 138, 140, 141,
142, 144, 145, 148, 149, 151, 152,
156, 157, 159, 160, 162, 163, 165
Perkawinan 6, 35, 41, 44, 46, 47, 54,
84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 118
Pradata 40, 41, 42
Priesterrad 44, 68

Q

Qadla 2, 4
Qadli 2, 5, 6, 7, 11, 15, 44, 48

R

Receptie theori 66
Receptio in complexu 48, 49
Reformasi 95, 96, 97, 98, 100, 106, 113
Research area 24, 28
Risalah 3

S

Sedekah 6, 35, 72, 73, 88, 91
Sengketa 6, 13, 17, 41, 53, 103, 107,
108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 124, 134, 145, 146, 148, 152,
153, 155, 157, 162
Serambi 29, 38, 40, 41, 68
Staatsblad 44, 45, 46, 47, 49, 52, 113,
114

Syar'iah 34, 62, 66, 71, 72, 73, 74, 75

U

Ulee balang 39

W

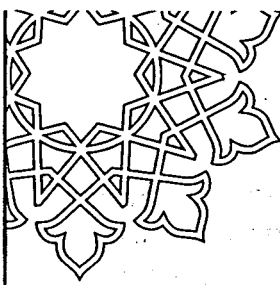
Wakaf 6, 35, 44, 66, 72, 73, 84, 88, 90,
91, 92, 93
Waris 6, 18, 35, 41, 44, 45, 46, 47, 48,
54, 66, 72, 73, 88, 91, 92, 93
Wasiat 6, 35, 88, 91

Z

Zakat 6, 92, 93







Tentang Penulis

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag, lahir di Bekasi, 10 Mei 1970. Ia menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung Jurusan Peradilan Agama (1991-1996), S-2 di Pascasarjana IAIN SGD Bandung Konsentrasi Hukum Islam dan Pranata Sosial (1998-2000), serta S-3 di Pascasarjana UIN SGD Bandung Konsentrasi Hukum Islam (2009-2012).

Ia adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung dengan mata kuliah keahlian Peradilan di Indonesia, Administrasi Perkawinan dan Wakaf, Hukum Zakat dan Wakaf, serta Manajemen Haji dan Umrah.

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman mengajar di beberapa lembaga perguruan tinggi, antara lain dosen Pascasarjana UIN SGD Bandung (2012 s.d. sekarang), ass. dosen tamu UIN Al-Raniry Banda Aceh, dosen STAI Siliwangi Bandung (1998-2005), dosen mata kuliah agama Islam Itenas Bandung (2007-2009), dosen agama Ikopin Jatinangor (1999-2003), dosen agama Stemik Padjadjaran Mandiri Bandung (2003-2005), dosen agama STT Mandala Bandung (1998-2003), dosen pendidikan agama STIE Ekuitas Bandung (2013-2015), dosen hukum Islam STAI HAS Cikarang, Bekasi (2009-sekarang).

Ia juga pernah aktif di sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama (1991-1992), Sekretaris III Unit Pengembangan *Tilawatil Qur'an* (UPTQ) IAIN SGD Bandung (1992-1994), Ketua I Senat Mahasiswa IAIN SGD Bandung (1993-1995), Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung (1995-1996), Ketua Dewan Presidium Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (Formasi) Ujung pandang (1995-1996), Sekretaris Umum Forum Mahasiswa



Pascasarjana UIN SGD Bandung (1998-2000), Pengurus BAZ Jawa Barat (1998-2008), Yayasan Piara Bandung (1992-1995), Ketua DKM Al-Amanah Bandung (2004-2011), pembimbing haji dan umrah PT Qiblat Tour Bandung (2003-sekarang), penceramah "Mutiarah Hikmah" di Radio Antasalam 103,9 FM Bandung (2001-2008), mengikuti pelatihan manajemen zakat di Malaysia (2002), Studi Hukum Keluarga di Doha Qatar (2006), Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN SGD Bandung (2008-2011), Sekretaris Forum Kajian Syariah, Hukum, dan Kemasyarakatan (PKSHK) Fakultas Syariah UIN SGD Bandung (2012-2014), Anggota Dewan Pakar Hukum dan HAM ICMI Jawa Barat (2012-2014), konsultan zakat, haji-umrah, hukum keluarga di Bandung (2000-sekarang), pengurus Lembaga Amil Zakat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1995-2003), Kepala Pusat Standar Mutu LPM UIN SGD Bandung (2015-2019), pengurus MUI Kota Bandung (2015-sekarang), mubalig kampus Jawa Barat.

Penulis memiliki sejumlah karya ilmiah yang sudah diterbitkan, di antaranya *Perundang-Undangan di Indonesia* (2012), *Pengantar Peradilan Islam (Buku Daras)* (2010), *Aspek-Aspek Hukum Peradilan Agama (Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah)* (2010), *Epistimologi Aliran Hukum Islam (Jurnal Al-Syari'ah)* (2010), *Penegakan HAM dalam Perspektif Al-Quran (Jurnal AN)* (2010), *Pedoman Pengelolaan Zakat di Jawa Barat, BAZ Jawa Barat* (1999), *Mutiara Zakat, BAZ Jawa Barat* (1999), *Panduan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZ Jabar* (2001), *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (ed), BAZ Jabar (2005), *Tafsir Kontekstual Islam dan Barat* (ed dan penerjemah bersama Dede Iswadi, M.Ag.) (2003), *Manajemen Strategis; Konsep dan Aplikasi* (ed) (2005), *Panduan Pelaksanaan Ibadah Haji* (2008), *Panduan Doa Manasik Umrah* (2007), *Haji di Indonesia; Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan* (2009), *Haji dan Umrah; Apa, Mengapa, dan Bagaimana* (2010), *Manajemen Zakat* (penyunting bersama Dr. A.Hasan Ridwan) (2011), *Bunga Rampai Teori Hukum Islam*, bersama Dra. Hj. Aah Tsmarotul Fuadah (2011), *Peradilan Agama di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum* (2015), *Kekuasaan Pengadilan* (2018), *Ensiklopedia Hukum Islam di Indonesia* (2018), serta makalah-makalah dan karya tulis ilmiah lainnya yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan.

